



LAPORAN AKHIR

2025

PENYUSUNAN KAJIAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN



LAPORAN AKHIR

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN HARAPAN LAMA SEKOLAH DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Kerjasama dengan

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan
Tahun 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR BAGAN.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1 LATAR BELAKANG	9
1.2 TUJUAN PENELITIAN	11
1.3 MANFAAT PENELITIAN.....	11
1.4 RUANG LINGKUP WILAYAH STUDI	11
1.5 SISTEMATIKA PROPOSAL.....	12
2.1 UMUM.....	13
2.1.1 Definisi Rata-rata Lama Sekolah (RLS).....	13
2.1.2 Definisi Harapan Lama Sekolah (HLS).....	13
2.1.3 Acuan Penilaian dari BPS	15
2.2 Latar Belakang Pekerjaan.....	15
2.3. Ruang Lingkup Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Data Dan Fasilitas Penunjang, Serta Alih Pengetahuan.....	17
2.3.1.Lingkup Kegiatan.....	17
2.3.2 Data dan Fasilitas Penunjang.....	18
2.3.3 Alih Pengetahuan.....	18
2.4 Maksud Dan Tujuan	19
2.5 Sasaran	19
2.6 Penentuan Sampel dan Responden	19
2.7 Jenis Dan Substansi Laporan.....	20
BAB III METODE STUDI KAJIAN.....	22
3.1 Penentuan Sampel Responenden	22
3.2 Teknik Pengumpulan Data	22
3.3 Teknik Analisis Data	27
3.4 Instrumen Penelitian.....	28
BAB IV ORGANISASI TIM PENYUSUN	29
4.1 Struktur Organisasi Dan Mekanisme Kerja.....	29
4.2 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	29
4.3 Kualifikasi Tenaga Ahli	30
BAB V.....	31
5.1 Kondisi Capaian dan Kesenjangan Pendidikan Berdasarkan Indikator RLS dan HLS	

ditinjau dari akses dan fasilitas sekolah melalui Kepala Sekolah	31
5.1.1 Kecukupan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Strategi Pembiayaan Tambahan	31
5.1.2 Kondisi Fasilitas Fisik Lembaga Pendidikan	32
5.1.3 Program dan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan	33
5.1.4 Siswa Berisiko Putus Sekolah: Faktor dan Strategi Penanganan	34
5.1.5 Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah	35
5.1.6 Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Berdasarkan Perspektif Institusi Sekolah	36
5.2 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Capaian RLS dan HLS dari Perspektif Masyarakat Usia 25-30 Tahun	38
5.2.1 Faktor Sosial-Budaya dan Norma Gender yang Dominan	38
5.2.2 Faktor Ekonomi sebagai Determinant Struktural	39
5.2.3 Faktor Akses, Minat, dan Alternatif	39
5.2.4 Hubungan Pendidikan terakhir masyarakat usia 25-30 tahun dengan alasan tidak melanjutkan studi	39
5.2.5 Implikasi terhadap Indikator Pembangunan Pendidikan Dampak terhadap Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	44
5.3 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Capaian RLS dan HLS dari Perspektif Siswa....	44
5.3.1 Distribusi Usia dan Jenjang Pendidikan	45
5.3.2 Aksesibilitas dan Mobilitas Siswa	45
5.3.3 Dukungan Ekonomi melalui Beasiswa	45
5.3.4 Peran dan Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan	46
5.4 Hubungan Program Pencegahan Putus Sekolah dengan Faktor Putus Sekolah berdasarkan laporan Guru	48
5.4.1 Pola laporan guru terhadap faktor penyebab putus sekolah antara satuan pendidikan yang telah memiliki dan tidak memiliki program pencegahan	50
5.4.2 Implikasi Temuan Dari Hasil Laporan Guru Terhadap Hubungan Program Pencegahan Putus Sekolah Dan Faktor-Faktor Penyebabnya	51
BAB VI	54
6.1 Ringkasan Eksekutif	54
6.1 Kerangka Konseptual dan Pendekatan Analisis	55
6.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	56
6.3 Peta Tantangan dan Isu Strategis Daerah	56
6.4 Rekomendasi Kebijakan Strategis	57
6.5 Rencana Aksi Daerah (Rad) 2026–2028	60
6.5.1 FASE 1: Jangka Pendek (Tahun 2026) - Emergency Response & Stabilization	60
6.5.2 FASE 2: Jangka Menengah (Tahun 2027) - Systemic Improvement & Expansion	61

6.5.3	FASE 3: Jangka Panjang (Tahun 2028) - Cultural Shift & Sustainability ..	62
6.6	Tata Kelola, Pembiayaan, Dan Manajemen Risiko.....	63
6.6.1	Struktur Tata Kelola dan Koordinasi.....	63
6.6.2	Strategi Rekayasa Pembiayaan (Financial Engineering).....	63
6.6.3	Manajemen Risiko	64
6.7	Kesimpulan Rencana Aksi Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan Kab. Pasuruan sesuai Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rata- rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di kabupaten pasuruan	65
	Daftar Pustaka	76
	Lampiran	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sistematika Laporan	12
Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasuruan	15
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasuruan 2025	16
Tabel 4. Kriteria Kecamatan	24
Tabel 5 Distribusi dan Kriteria Operasional Pemilihan Sekolah	25
Tabel 6 Matriks Kriteria Operasional Stratifikasi	25
Tabel 7 Jadwal Penyusunan Kajian Peningkatan Kualitas Pendidikan	30
Tabel 8 Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang Terlibat	30
Tabel 9. Tabulasi Silang Hubungan Pendidikan Terakhir dengan Alasan tidak lanjut Sekolah	40
Tabel 10 Hasil Chisquare Hubungan Pendidikan Terakhir Dan Alasan Tidak Melanjutkan Studi	41
Tabel 11. Tabel Silang Hubungan Program Pencegahan Putus Sekolah dan Faktor Penyebab	48
Tabel 12 Uji Chi-Square keberadaan program dan variasi faktor penyebab putus sekolah	50
Tabel 13. Sintesis Isu Strategis	56
Tabel 14 Program Emergency Response & Stabilization	60
Tabel 15. Program Systemic Improvement & Expansion	61
Tabel 16. Program Cultural Shift & Sustainability	62
Tabel 17. Manajemen Risiko	64
Tabel 18. Kesimpulan Rencana Aksi Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan Kab. Pasuruan	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Teknik Pengumpulan Data	22
Gambar 2. Analisis Deskriptif RLS dan HLS Kabupaten Pasuruan 2023	27
Gambar 3 Visualisasi Faktor Putus Sekolah Berdasarkan Implementasi Program Pencegahan	49

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Tim Pelaksana Kegiatan	29
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia karena melalui pendidikan yang berkualitas, sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Pendidikan memungkinkan masyarakat untuk bersaing baik di tingkat lokal, nasional, maupun global (Elfira et al., 2024; Mustofa et al., 2024). Dalam konteks pembangunan manusia, terdapat dua indikator kunci di bidang pendidikan yang sering digunakan, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kedua indikator ini memiliki peran penting dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal rata-rata yang ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas (Dai et al., 2023; Rohmah & Prakoso, 2022). Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) mengukur lama pendidikan yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak yang berusia 7 tahun ke atas di masa mendatang (Irawan, 2020). Kedua indikator ini memberikan gambaran mengenai capaian pendidikan di suatu daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kabupaten Pasuruan tahun 2025, capaian RLS hanya mencapai 7,3–7,4 tahun, sedangkan HLS sebesar 12,78 tahun. Angka-angka ini masih berada di bawah rata-rata yang ada di Provinsi Jawa Timur, menandakan adanya permasalahan yang harus segera diatasi (BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR, n.d.; *Indeks-Pembangunan-Manusia--Ipm--Kabupaten-Pasuruan-Tahun-2025*, n.d.-a). Rendahnya capaian pendidikan di Kabupaten Pasuruan mengindikasikan adanya berbagai faktor penghambat, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun kebijakan daerah. Rendahnya RLS dan HLS dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kualitas hidup generasi muda. Efek domino yang mungkin terjadi adalah meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, serta ketimpangan sosial di masyarakat (Rohmah & Prakoso, 2022). Oleh karena itu, penting untuk melakukan identifikasi dan analisis faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya capaian pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

Salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan adalah kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, dan tingkat kemiskinan sangat berpengaruh terhadap partisipasi anak dalam pendidikan formal. Selain itu, faktor kelembagaan seperti ketersediaan sekolah, jumlah guru, dan fasilitas pendidikan juga menjadi penentu capaian pendidikan.

Partisipasi masyarakat, terutama peran serta orang tua, menjadi faktor lain yang sangat penting. Kesadaran akan pentingnya pendidikan, motivasi, serta dukungan orang tua terhadap anak-anak mereka sangat memengaruhi keberhasilan pendidikan. Dari sisi kebijakan, program-program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa, dan pemerataan akses sekolah perlu dievaluasi efektivitasnya. Kebijakan yang tepat dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

Permasalahan pendidikan di Kabupaten Pasuruan juga dihadapkan pada tantangan geografis (Sholihah, 2024; Suadi, 2022). Beberapa wilayah di kabupaten ini sulit dijangkau, sehingga akses anak untuk bersekolah menjadi terbatas. Ketimpangan antar kecamatan semakin memperburuk kondisi pendidikan. Di beberapa kecamatan, capaian RLS dan HLS jauh di bawah rata-rata daerah sehingga perlu adanya intervensi khusus dari pemerintah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan kajian kebijakan yang mampu menghasilkan rekomendasi strategis dan terukur bagi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi capaian dan kesenjangan pendidikan berdasarkan indikator RLS dan HLS, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi capaian tersebut, baik dari sisi ekonomi, sosial, infrastruktur, maupun kebijakan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan dan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk peningkatan mutu pendidikan yang berbasis pada data dan fakta lapangan. Penelitian ini akan memberikan manfaat praktis sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program strategis pendidikan daerah. Selain itu, manfaat empiris berupa gambaran berbasis data tentang kondisi dan tantangan pendidikan di Pasuruan juga akan diperoleh.

Dari sisi kelembagaan, hasil penelitian ini akan mendukung perumusan Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Mutu Pendidikan 2026–2028 yang

sangat dibutuhkan untuk perbaikan berkelanjutan. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan metode mixed methods (kualitatif dan kuantitatif). Pendekatan ini dinilai paling tepat untuk menggambarkan kondisi pendidikan secara menyeluruh.

Instrumen penelitian meliputi survei lapangan dengan kuesioner sederhana, wawancara dengan panduan semi-terstruktur, Focus Group Discussion (FGD) dengan panduan diskusi terarah, serta observasi menggunakan lembar observasi di sekolah dasar dan menengah. Dengan hasil penelitian yang komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan strategi kebijakan peningkatan mutu pendidikan daerah, serta disusun dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk Kabupaten Pasuruan.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis kondisi capaian dan kesenjangan pendidikan berdasarkan indikator RLS dan HLS.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi capaian RLS dan HLS (ekonomi, sosial, infrastruktur, kebijakan).
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk peningkatan mutu pendidikan.

1.3 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pasuruan, khususnya terkait capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

1.4 RUANG LINGKUP WILAYAH STUDI

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada kecamatan-kecamatan yang memiliki capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang masih berada di bawah rata-rata provinsi. Pemilihan wilayah studi ini didasarkan pada data capaian pendidikan yang menunjukkan adanya kesenjangan dan tantangan signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan di beberapa kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Ruang lingkup wilayah studi ini mencakup analisis kondisi pendidikan di tingkat kecamatan yang menjadi fokus penelitian, sehingga hasil kajian dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik dan aplikatif terkait faktor-faktor yang memengaruhi capaian pendidikan di wilayah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi pendidikan secara umum di Kabupaten Pasuruan, tetapi juga menyoroti wilayah-wilayah yang menghadapi tantangan terbesar dalam peningkatan mutu pendidikan.

1.5 SISTEMATIKA PROPOSAL

Sistematika laporan ini disusun sebagaimana Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Sistematika Laporan

BAB I	Pendahuluan	Menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika laporan.
BAB II	Pemahaman dan Tanggapan Kerangka Acuan Kerja	Menguraikan tentang Pemahaman dan Tanggapan Kerangka Acuan Kerja berkaitan dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)
BAB III	Metode Studi Kajian	Penentuan Sampel Responden Teknik Pengumpulan Data Panduan Implementasi Lapangan & Kontrol Kualitas Teknik Analisis Data
BAB IV	Organisasi Tim Penyusun	Menguraikan timeline pelaksanaan teknis
BAB V	Usulan Biaya	Menguraikan aktivitas Penelitian dari awal hingga akhir pelaksanaan
BAB VI	Penutup	Menguraikan kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

PEMAHAMAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

2.1 UMUM

2.1.1 Definisi Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah ukuran statistik yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di suatu wilayah (Dai et al., 2023; Rohmah & Prakoso, 2022). RLS mencerminkan pengalaman pendidikan yang sudah dijalani oleh penduduk dan bersifat retrospektif. Secara teknis, RLS dihitung dengan membagi total tahun sekolah yang telah ditempuh oleh seluruh penduduk dalam kelompok usia tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian pendidikan aktual masyarakat dan menjadi salah satu komponen utama dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi pendidikan (*Indeks-Pembangunan-Manusia--Ipm--Kabupaten-Pasuruan-Tahun-2025*, n.d.-b).

RLS sangat penting karena semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin besar peluang penduduk untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Pendidikan yang lebih lama juga berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas hidup, seperti penurunan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesehatan masyarakat. Faktor-faktor yang memengaruhi RLS antara lain ketersediaan dan aksesibilitas lembaga pendidikan, kondisi sosial ekonomi keluarga, nilai budaya dan sosial masyarakat, kebijakan pemerintah seperti program wajib belajar dan beasiswa, serta infrastruktur pendidikan yang memadai.

2.1.2 Definisi Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator proyektif yang mengukur rata-rata jumlah tahun sekolah yang diharapkan akan ditempuh oleh seorang anak yang memasuki usia sekolah (biasanya usia 7 tahun ke atas) di masa depan, dengan asumsi pola partisipasi pendidikan saat ini tetap konstan (Irawan, 2020). HLS dihitung berdasarkan tingkat partisipasi sekolah pada setiap kelompok umur dan menggambarkan potensi partisipasi pendidikan yang akan dicapai oleh

generasi muda. Dengan kata lain, HLS menunjukkan peluang atau kesempatan pendidikan yang tersedia bagi anak-anak saat ini untuk menyelesaikan jenjang pendidikan formal mereka (*Indeks-Pembangunan-Manusia--Ipm--Kabupaten-Pasuruan-Tahun-2025*, n.d.-b).

HLS penting sebagai indikator investasi pendidikan yang diproyeksikan oleh pemerintah dan masyarakat untuk generasi mendatang. Nilai HLS yang tinggi mengindikasikan sistem pendidikan yang berfungsi baik dalam menyediakan akses dan kesempatan pendidikan yang luas. Teori modal manusia (Human Capital Theory) menjelaskan bahwa pendidikan yang lebih lama meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, teori fungsionalisme menekankan fungsi pendidikan sebagai sarana sosialisasi nilai dan pelatihan keahlian, sedangkan teori reproduksi sosial mengingatkan bahwa HLS juga dapat mencerminkan ketimpangan akses pendidikan antar kelompok sosial.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** adalah rata-rata jumlah tahun yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal, baik yang telah tamat maupun belum tamat pada jenjang pendidikan tertentu (BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR, n.d.). RLS dihitung dengan membagi total tahun sekolah yang telah ditempuh oleh seluruh penduduk dalam kelompok usia tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut. Indikator ini bersifat retrospektif dan menjadi salah satu komponen utama dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Faktor-faktor yang memengaruhi HLS meliputi ketersediaan lembaga pendidikan yang mudah diakses, kondisi ekonomi keluarga, nilai sosial budaya yang mendukung pendidikan, kebijakan pemerintah seperti wajib belajar dan beasiswa, serta kondisi geografis dan infrastruktur yang memudahkan akses ke sekolah.

Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut BPS adalah rata-rata jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak pada usia tertentu (biasanya usia 7 tahun), dengan asumsi pola partisipasi pendidikan saat ini akan tetap sama hingga anak tersebut menyelesaikan pendidikan formalnya (*Indeks-Pembangunan-Manusia--Ipm--Kabupaten-Pasuruan-Tahun-2025*, n.d.-b). HLS

dihitung berdasarkan tingkat partisipasi sekolah pada setiap kelompok umur).

2.1.3 Acuan Penilaian dari BPS

BPS menggunakan dua indikator utama dalam dimensi pendidikan pada IPM, yaitu:

- **Rata-rata Lama Sekolah (HLS)**
- **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Kedua indikator ini digunakan untuk menilai capaian pembangunan manusia dalam aspek pengetahuan dan menjadi dasar evaluasi kebijakan pendidikan di daerah.

2.2 Latar Belakang Pekerjaan

Kabupaten Pasuruan adalah salah satu kabupaten terbesar di Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan beberapa wilayah lain di sekitarnya dan memiliki posisi strategis di provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Pasuruan terletak di antara $112^{\circ}15'$ – $113^{\circ}15'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}30'$ – $7^{\circ}55'$ Lintang Selatan. Dari aspek topografi, Kabupaten Pasuruan memiliki ketinggian rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut dengan Tingkat kemiringan bervariasi antara 0-40 persen. Seluruh wilayah kabupaten ini berbatasan dengan beberapa kabupaten tetangga, sehingga secara geografis Kabupaten Pasuruan menjadi wilayah yang cukup luas dan beragam. Selain itu, wilayah Kabupaten Pasuruan juga dilintasi oleh beberapa sungai penting yang berperan dalam sejarah dan kehidupan masyarakat setempat.

Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

Kecamatan District	Ibukota Kecamatan Capital of District	Luas Total Area (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Purwodadi	Desa Purwodadi	102,46
Tutur	Desa Wonosari	86,30
Puspo	Desa Puspo	58,35
Tosari	Desa Tosari	98,00
Lumbang	Desa Cukurguling	125,55
Pasrepan	Desa Pasrepan	89,95
Kejayan	Kel. Kejayan	79,15
Wonorejo	Desa Wonorejo	47,30
Purwosari	Kel. Purwosari	59,87
Prigen	Kel. Prigen	121,90
Sukorejo	Desa Glagahsari	58,18
Pandaan	Kel. Petungasri	43,27
Gempol	Desa Karangrejo	64,92
Beji	Desa Beji	39,90
Bangil	Kel. Kolorsari	44,60
Rembang	Desa Rembang	42,52
Kraton	Desa Kraton	50,75

Kecamatan District	Ibukota Kecamatan Capital of District	Luas Total Area (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Pohjentrek	Desa Susukan Rejo	11,88
Gondang Wetan	Kel. Gondangwetan	26,25
Rejoso	Desa Rejoso Lor	37,00
Winongan	Desa Winongan Lor	45,97
Grati	Kel. Grattunon	50,78
Lekok	Desa Tambaklekok	46,57
Nguling	Desa Nguling	42,60
Kabupaten Pasuruan	Kecamatan Bangil	1.474,02

(Sumber: BPS, Luas Wilayah Kabupaten pasuruan menurut Kecamatan 2025)

Berdasarkan data BPS terbaru, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 adalah 1.474,02 (km²/sq.km) BPS 2025, : 1.634.000 jiwa (Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan 2025). Wilayah administratif Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 kecamatan, 24 kelurahan, dan 341 desa. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan adalah 1.474,02 (km²/sq.km). Kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat adalah Kecamatan Bangil, diikuti oleh Kecamatan Pandaan dan Purwosari.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasuruan 2025

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	56.368	53.125	109.493
5–9	68.274	64.265	132.539
10–14	69.017	63.829	132.846
15–19	56.037	53.250	109.287
20–24	65.200	62.932	128.132
25–29	65.440	61.660	127.100
30–34	61.188	59.399	120.587
35–39	60.187	60.282	120.469
40–44	64.422	66.562	130.984
45–49	58.813	64.015	122.828
50–54	56.437	59.406	115.843
55–59	49.169	54.314	103.483
60–64	39.426	42.340	81.766
65–69	28.007	29.118	57.125
70–74	18.166	18.164	36.330
75+	14.954	22.156	37.110
Kabupaten Pasuruan	831.105	834.817	1.665.922

(Sumber: BPS, Kabupaten Pasuruan 2025)

Sebagai kabupaten yang memiliki potensi dan jumlah penduduk yang signifikan, Kabupaten Pasuruan memiliki jumlah penduduk yang terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Berdasarkan data terbaru, kecamatan dengan Wilayah Kecamatan Jumlah Penduduk 12 jumlah penduduk terpadat di Kabupaten Pasuruan adalah Kecamatan Bangil, diikuti oleh Kecamatan Pandaan, dan Kecamatan Purwosari (*Indeks-Pembangunan-Manusia--Ipm--Kabupaten-Pasuruan-Tahun-2025*, n.d.-b). Kecamatan Bangil memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, kemudian disusul oleh Kecamatan Pandaan dan Kecamatan Purwosari yang juga memiliki populasi yang signifikan.

2.3. Ruang Lingkup Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Data Dan Fasilitas Penunjang, Serta Alih Pengetahuan

2.3.1. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan yang ditetapkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Persiapan dilakukan oleh pelaksana pekerjaan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, antara lain meliputi koordinasi dan konsolidasi tim tenaga ahli dan tenaga administrasi yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan. Penyiapan administrasi dan koordinasi dengan instansi terkait, penyiapan peralatan, penyusunan jadwal dan studi literatur awal, serta hal-hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan pengumpulan data. Secara Detail Pekerjaan ini

2. Tahap Survey dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder, yang selanjutnya dikaitkan dengan teori untuk memperoleh penilaian sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Data primer yaitu data yang belum diolah dan diperoleh dengan cara:

- a) Mengidentifikasi permasalahan isu / strategis yang difokuskan pada komponen pendidikan, yaitu rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 25 tahun dan harapan lama sekolah anak usia 7 tahun.
- b) Mengumpulkan data / informasi anak tidak sekolah dan putus sekolah, serta penduduk diatas 25 tahun yang belum lulus Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.
- c) Menganalisis data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur dan dokumen yang terkait dengan penelitian;
- d) Dialog langsung dengan pemberi informasi dan Narasumber maupun Pengarah dalam penyusunan Kajian, mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan topik; antara lain dengan Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (P3D) Kabupaten Pasuruan
- e) Focus Group Discussion (FGD) yaitu menyebarluaskan/ melakukan diskusi dengan para stakeholder terkait dengan hasil kajian yang bersifat sementara

untuk menjaring masukan dan pandangannya terhadap hasil sementara tersebut.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Analisa data untuk pengolahan data hasil di lapangan. Tahapan analisa ini berupa: (1) tabulasi data (2) kompilasi data, (3) penilaian terhadap berbagai keadaan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pendekatan dan metode serta teknis analisa yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Pendahuluan berisi tentang Laporan Pendahuluan tentang Penyusunan Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan dan Penyusunan Laporan Akhir sebagai tahap akhir dari pelaksanaan pekerjaan dan Rencana Aksi Daerah Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah, dengan serangkaian aktifitas yang terarah dan target terukur.

2.3.2 Data dan Fasilitas Penunjang

1. Penyediaan oleh pemberi tugas

Data dan informasi yang terkait dengan pekerjaan yang dimiliki pemberi tugas dapat dipergunakan dan dipelihara oleh penyedia jasa sebagai referensi atau masukan awal dalam penyiapan pelaksanaan pekerjaan, atas seizin pemberi tugas. Data tersebut harus dipelihara oleh penyedia jasa sebagai referensi atau masukan awal dalam penyiapan pelaksanaan pekerjaan, atas seizin pemberi tugas. Data tersebut harus dipelihara oleh penyedia jasa dan harus dikembalikan.

2. Penyediaan oleh Penyedia jasa

Data dan informasi yang disediakan oleh penyedia jasa mencakup materi yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan pekerjaan ini termasuk data yang sama dan sesuai standar bagi seluruh rangkaian kegiatan.

2.3.3 Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.

2.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud penelitian ini adalah menganalisis, dan mencari solusi guna memperbaiki serta meningkatkan kualitas pendidikan agar sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang ditetapkan. Berfokus pada berbagai aspek, seperti strategi peningkatan kompetensi guru, pengelolaan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, serta efektivitas manajemen pendidikan, dengan tujuan akhir menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu dengan Memberikan Rekomendasi Kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan antara lain:

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pendidikan, mulai Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Tingkat Tinggi.
2. Memperluas akses pendidikan dan pembelajaran bagi masyarakat luas, khususnya mereka yang kesulitan mengakses pendidikan formal, melalui penyediaan layanan pendidikan kesetaraan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan potensi lokal demi meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui 2 Dimensi Pendidikan yaitu Angka Rata Rata Sekolah dan Angka Harapan Sekolah

2.5 Sasaran

1. Memberikan gambaran dan analisis kondisi pendidikan,
2. Mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya RLS dan HLS,
3. Memberikan rekomendasi dan strategi kebijakan,
4. Menyusun dokumen RAD Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten Pasuruan 2026–2028.

2.6 Penentuan Sampel dan Responden

Penentuan sampel dan responden dilakukan secara ilmiah menggunakan metode probabilitas, sehingga setiap unsur populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Target populasi meliputi masyarakat, guru, kepala sekolah, orang tua siswa, siswa, dan pejabat Dinas Pendidikan di seluruh kecamatan Kabupaten Pasuruan. Distribusi responden dilakukan secara proporsional di 24 kecamatan dan 341 desa.pdf).

Metode pengambilan sampel dan teknik pengumpulan data mengacu pada standar survei BPS dan penelitian pendidikan, dengan pendekatan mixed methods (kualitatif dan kuantitatif) untuk memperoleh hasil yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2.7 Jenis Dan Substansi Laporan

Adapun jenis dan substansi dari masing-masing laporan atau produk dari studi Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan, adalah sebagai berikut:

1. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan sekurang-kurangnya memuat pemahaman konsultan terhadap lingkup pekerjaan, konsep pendekatan dan metodologi studi dan pelaksanaan pekerjaan, program kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, 15 termasuk daftar kebutuhan data dan rencana survei lapangan berikut formulirformulir survei lapangan yang diperlukan serta dukungan tenaga ahli beserta perlengkapannya. Laporan diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama/kontrak sebanyak 5 (lima) buku laporan dan dipresentasikan di depan pengguna jasa dan/atau Tim Teknis.

2. Laporan Antara

Laporan antara berupa Laporan Fakta dan Analisa yang sekurang-kurangnya memuat, antara lain:

- a) Hasil survei lapangan dan kajian teknis terhadap kondisi eksisting;
- b) Hasil analisis awal
- c) Hasil kesimpulan sementara dan memuat saran atau rekomendasi. Laporan diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama/kontrak sebanyak 5 (lima) buku laporan.

3. Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat seluruh hasil pelaksanaan kegiatan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan yang telah direvisi/disempurnakan berdasarkan pembahasan Bersama dan masukan/koreksi dari Tim Teknis. Laporan akhir diserahkan

selambatlambatnya 3 (empat) bulan sejak penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama/kontrak sebanyak 5 (lima) buku laporan;

- a) Executive Summary sebanyak 5 (lima) buah;
- b) Softcopy seluruh keluaran dan dokumentasi kegiatan di dalam Flashdisk sebanyak 6 (Enam) buah

BAB III

METODE STUDI KAJIAN

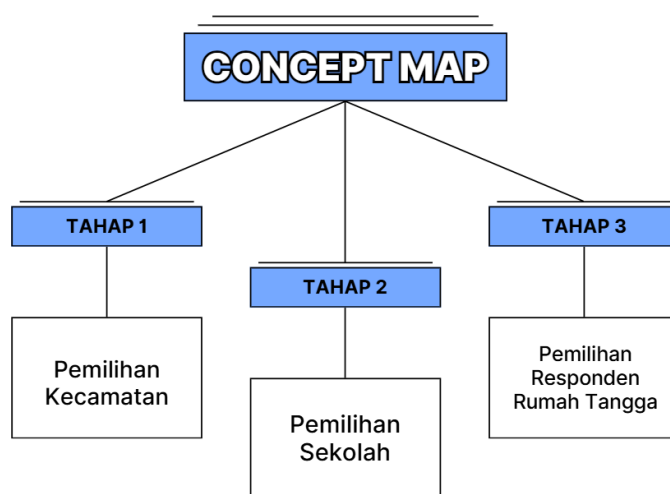
Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan metode *mixed methods*, yaitu menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih agar pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti menjadi lebih komprehensif, baik dari sisi data kualitatif maupun kuantitatif. Pada aspek kualitatif, digunakan analisis tematik dan analisis kebijakan, sedangkan pada aspek kuantitatif digunakan analisis deskriptif dan tabulasi sederhana dari data survey.

3.1 Penentuan Sampel Responden

Populasi dalam kajian ini adalah seluruh masyarakat, guru, kepala sekolah, orang tua siswa, siswa, dan pejabat Dinas Pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Penentuan responden dilakukan secara proporsional di seluruh kecamatan dan desa, dengan memperhatikan kecamatan yang memiliki capaian RLS dan HLS di bawah rata-rata provinsi.

Pengambilan sampel dilakukan secara ilmiah menggunakan metode *probability sampling* (acak), sehingga setiap unsur populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Jumlah responden ditentukan berdasarkan distribusi penduduk, jumlah sekolah, dan capaian indikator pendidikan di masing-masing kecamatan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data



Gambar 1. Teknik Pengumpulan Data

Tahap 1

Tahap pertama dalam pelaksanaan kajian mutu pendidikan di Kabupaten Pasuruan adalah pemilihan kecamatan sebagai lokasi studi. Dari total 24 kecamatan yang ada, pemilihan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel secara sengaja dan terarah berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini dipilih agar kajian dapat menangkap keragaman kondisi pendidikan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di berbagai wilayah dengan karakteristik yang berbeda.

Secara operasional, pemilihan kecamatan didasarkan pada tiga kriteria utama. Pertama, dipilih tiga kecamatan dengan nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) terendah. Kecamatan-kecamatan ini dipilih untuk merepresentasikan wilayah dengan tantangan pendidikan paling signifikan, sehingga analisis dapat mengidentifikasi faktor penghambat utama dan kebutuhan intervensi yang mendesak. Kedua, tiga kecamatan dengan nilai RLS dan HLS yang berada pada kisaran rata-rata kabupaten juga dipilih. Kecamatan ini berfungsi sebagai representasi kondisi pendidikan yang umum atau tipikal di Kabupaten Pasuruan, sehingga dapat menjadi tolok ukur perbandingan dengan kecamatan lain. Ketiga, untuk memastikan keberagaman konteks geografis, dipilih dua hingga empat kecamatan tambahan yang memiliki karakteristik geografis berbeda, seperti wilayah pesisir (misal: Lekok, Nguling), pegunungan (misal: Tosari, Puspo), dan kawasan urban (misal: Bangil, Pandaan).

Pemilihan kecamatan dengan pendekatan stratified purposive sampling ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai mutu pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian, hasil kajian tidak hanya merefleksikan kondisi rata-rata, tetapi juga mampu mengidentifikasi tantangan spesifik di wilayah-wilayah ekstrem maupun unik secara geografis. Strategi ini sejalan dengan standar akademik penelitian pendidikan, di mana variasi dan kedalaman informasi lebih diutamakan daripada sekadar representasi statistik.

Tabel 4. Kriteria Kecamatan

Kriteria Pemilihan	Jumlah Kecamatan	Tujuan Representasi
RLS & HLS terendah	3	Tantangan pendidikan tertinggi
RLS & HLS rata-rata	3	Kondisi pendidikan tipikal
Karakteristik geografis berbeda	2–4	Variasi geografis dan sosial

Tahap 2

Pada tahap kedua kajian mutu pendidikan di Kabupaten Pasuruan, pemilihan sekolah dilakukan di kecamatan-kecamatan yang telah terpilih pada tahap sebelumnya. Metode yang digunakan adalah Stratified Random Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak yang terstratifikasi berdasarkan jenjang pendidikan. Dalam setiap kecamatan terpilih, seluruh sekolah dikelompokkan ke dalam tiga strata utama: Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK). Dari masing-masing strata, dipilih secara acak 2 SD, 2 SMP, dan 1–2 SMA/SMK menggunakan simple random sampling, sehingga total terdapat 5–7 sekolah per kecamatan. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan data Dapodik yang telah diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan daftar sekolah. Setiap sekolah dalam stratum memiliki peluang yang sama untuk terpilih, sehingga hasil kajian dapat merepresentasikan kondisi pendidikan di seluruh jenjang secara adil dan bebas dari bias seleksi. Selain itu, langkah-langkah quality assurance seperti verifikasi data, dokumentasi proses randomisasi, dan penerapan bobot sampling dilakukan untuk menjaga validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Dengan pendekatan ini, kajian mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tingkat institusi, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan dapat digeneralisasi ke seluruh populasi sekolah di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 5 Distribusi dan Kriteria Operasional Pemilihan Sekolah

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sampel per Kecamatan	Metode Sampling	Kriteria Stratifikasi	Sumber Data
SD	2	Simple Random Sampling	Jenjang, lokasi, ukuran, akreditasi	Dapodik
SMP	2	Simple Random Sampling	Jenjang, status, akreditasi	Dapodik
SMA/SMK	1–2	Simple Random Sampling	Jenjang, program studi, keahlian	Dapodik

Tabel 6 Matriks Kriteria Operasional Stratifikasi

Kriteria	SD	SMP	SMA/SMK
Status Sekolah	Negeri/Swasta	Negeri/Swasta	Negeri/Swasta
Akreditasi	A/B/C/Belum Terakreditasi	A/B/C/Belum Terakreditasi	A/B/C/Belum Terakreditasi
Ukuran Sekolah	<300, 300–500, >500	<200, 200–400, >400	<300, 300–600, >600
Lokasi Geografis	Urban/Rural/Coastal/Mountain	Urban/Rural/Coastal/Mountain	Urban/Rural/Coastal/Mountain

Panduan Implementasi Lapangan & Kontrol Kualitas

- **Persiapan Data:** Unduh dan verifikasi data sekolah dari Dapodik untuk setiap kecamatan terpilih.
- **Stratifikasi:** Kelompokkan sekolah berdasarkan jenjang (SD, SMP, SMA/SMK).
- **Randomisasi:** Lakukan simple random sampling di setiap stratum menggunakan generator angka acak.
- **Verifikasi:** Konfirmasi identitas sekolah terpilih dan koordinasi dengan kepala sekolah.

- **Kontrol Kualitas:** Dokumentasikan proses randomisasi, pantau respons rate, dan lakukan audit trail untuk memastikan transparansi dan replikabilitas.

Tahap ke 3

Pada tahap ketiga, pemilihan responden rumah tangga dilakukan untuk memperoleh data primer yang mewakili kondisi sosial-ekonomi dan pendidikan masyarakat di kecamatan-kecamatan terpilih. Proses ini diawali dengan penentuan ukuran sampel total menggunakan Rumus Slovin, yang dirancang untuk menghasilkan jumlah sampel yang memadai dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 5%. Rumus yang digunakan adalah:

$$n = N / (1 + N(e^2))$$

di mana n adalah ukuran sampel, N adalah jumlah populasi rumah tangga, dan e adalah margin of error. Sebagai contoh, jika populasi rumah tangga di wilayah studi adalah 50.000, maka ukuran sampel yang diperoleh sekitar 397 rumah tangga. Untuk skala Kabupaten Pasuruan, dengan estimasi populasi 410.000 rumah tangga, ukuran sampel yang dihasilkan adalah sekitar 400 rumah tangga. Namun, untuk meningkatkan validitas statistik, disarankan penyesuaian dengan design effect (DEFF) menjadi sekitar 600 rumah tangga, sesuai standar survei nasional dan internasional.

Setelah ukuran sampel total ditentukan, langkah berikutnya adalah mengalokasikan jumlah sampel ke masing-masing kecamatan secara proporsional berdasarkan jumlah rumah tangga di setiap kecamatan. Metode Probability Proportional to Size (PPS) memastikan bahwa kecamatan dengan populasi lebih besar mendapatkan alokasi sampel lebih banyak, sehingga representasi data tetap seimbang dan adil. Sebagai ilustrasi, kecamatan Gempol dengan jumlah rumah tangga terbesar akan menerima alokasi sampel lebih banyak dibanding kecamatan dengan populasi lebih kecil.

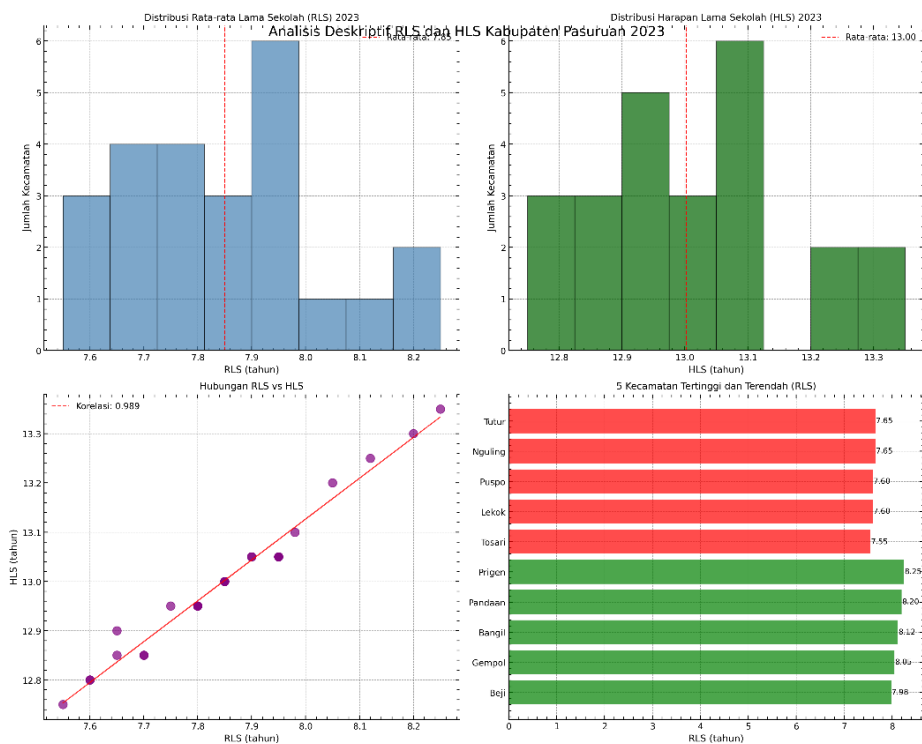
Tahap terakhir adalah pemilihan rumah tangga secara acak di setiap kecamatan. Pemilihan ini dilakukan menggunakan daftar rumah tangga resmi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau daftar administrasi desa. Dengan teknik random sampling, setiap rumah tangga dalam daftar memiliki

peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden, sehingga menghindari bias seleksi dan meningkatkan keabsahan hasil kajian.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam kajian peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pasuruan dilakukan secara terpadu dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

1. **Analisis Deskriptif & Spasial (GIS)** untuk Membuat peta tematik RLS dan HLS menggunakan software GIS (seperti QGIS). Menghitung **Indeks Gini Pendidikan** untuk mengukur ketimpangan antar kecamatan.



Gambar 2. Analisis Deskriptif RLS dan HLS Kabupaten Pasuruan 2023

2. Analisis Regresi Linier Berganda untuk Menguji pengaruh variabel independen (X1: Pendapatan, X2: Jarak ke Sekolah, X3: Pendidikan Orang Tua, dll.) terhadap variabel dependen (Y: RLS atau HLS). Analisis menggunakan software SPSS 2.4
3. Analisis Tematik untuk Transkripsi hasil wawancara dan FGD, Koding data untuk mengidentifikasi tema-tema (hambatan biaya, pernikahan dini), serta Kategorisasi tema menjadi faktor-faktor utama.

4. Triangulasi & Matriks Integrasi untuk membuat matriks side-by-side yang membandingkan hasil dari temuan kuantitatif, kualitatif, serta implikasi kebijakan.
5. Analisis SWOT & Logical Framework (logframe) menggunakan data hasil Lokakarya (Workshop) kemudian di analisis SWOT. Dari hasil SWOT digunakan untuk penyusunan strategi. Logframe berisikan Tujuan, Keluaran (Outputs), Kegiatan, Indikator Keberhasilan, Sarana Verifikasi, Serta Asumsi.

3.4 Instrumen Penelitian

1. Studi Dokumen bersikan Panduan Ekstraksi Data: Formulir terstruktur untuk mengambil data RLS, HLS, IPM, angka putus sekolah, APBD pendidikan, jumlah sekolah/guru dari BPS dan Dinas terkait.
2. Kuesioner untuk survey lapangan berisikan Kuesioner Terstruktur (seperti dalam lampiran, tapi harus diuji validitas & reliabilitasnya). Dilakukan oleh enumerator terlatih.
3. Focus Group Discussion (FGD) berisikan Panduan FGD (seperti dalam lampiran). Setiap kecamatan terpilih diadakan 1-2 sesi FGD dengan peserta yang berbeda (guru/orang tua, tokoh masyarakat/pemerintah). Direkam dan ditranskrip.
4. Wawancara Mendalam dengan menggunakan Panduan Wawancara Semi-terstruktur. Sasaran: Kepala Dinas Pendidikan, Camat, Kepala Sekolah di lokasi ekstrim (RLS tertinggi & terendah).
5. Observasi Lapangan yang berisikan Lembar Ceklis Observasi untuk menilai kondisi infrastruktur sekolah (kelas, perpustakaan, sanitasi) dan akses jalan menuju sekolah.

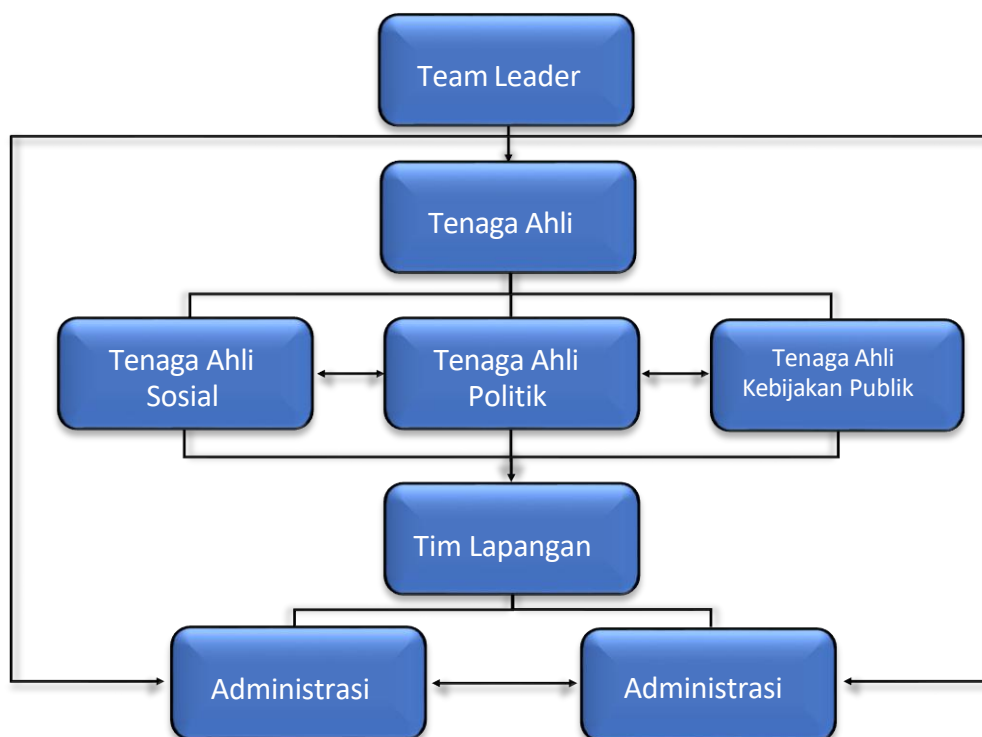
BAB IV

ORGANISASI TIM PENYUSUN

4.1 STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA

Kegiatan penyusunan kajian peningkatan kualitas pendidikan oleh instansi pemerintah Pemerintah Kabupaten Pasuruan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan. Agar pelaksanaan survei dapat mencapai pekerjaan yang memenuhi sasaran sesuai dengan Kerangka Acuan kerja (KAK), maka disusunlah suatu organisasi pelaksanaan pekerjaan seperti terlihat pada Bagan 1 berikut.

Bagan 1 Struktur Tim Pelaksana Kegiatan



4.2 JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jadwal pelaksanaan pekerjaan terdiri dari beberapa tahapan pekerjaan yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan perumusan dan tahapan laporan. Jadwal pelaksanaan studi secara detail dapat diperiksa pada tabel di bawah ini.

Tabel 7 Jadwal Penyusunan Kajian Peningkatan Kualitas Pendidikan

No	Kegiatan	Bulan-1				Bulan-2				Bulan-3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan												
2	Identifikasidan Pengumpulandata awal												
3	Penyusunan laporan pendahuluan												
4	Penyampaian dan Pembahasan Laporan Pendahuluan												
5	Penyerahan Laporan Awal												
6	Penyusunan Laporan Akhir												
7	Penyampaian dan Pembahasan Laporan Akhir												
8	Penyerahan Laporan Akhir												

4.3 KUALIFIKASI TENAGA AHLI

Dalam menangani kegiatan Penyusunan Kajian Peningkatan Kualitas Pendidikan dibentuk tim perencana yang solid. Semua personil yang akan ditugaskan dalam pekerjaan ini memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing serta mempunyai pengalaman di bidangnya.

Tabel 8 Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang Terlibat

No	Posisi	Kualifikasi Minimal (Pendidikan- Pengalaman)	Jumlah Orang (Bulan)
1	KetuaTim	S2-IlmuPendidikan 3Tahun	1 Orang
2	TenagaAhli	S2-Ilmu Sosial 3Tahun	1 Orang
3	TimTehnis	S1-IlmuPendidikan-1tahun	1 Orang
4	Tenaga Administrasi Tehnis danAdministrasi	S1-IlmuAdministrasi- 1tahun	1 Orang

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kondisi Capaian dan Kesenjangan Pendidikan Berdasarkan Indikator RLS dan HLS ditinjau dari akses dan fasilitas sekolah melalui Kepala Sekolah

Gambaran Umum Responden dan Lembaga Pendidikan di Kabupaten Pasuruan Studi ini melibatkan 74 responden yang merupakan kepala sekolah dari berbagai lembaga pendidikan di Kabupaten Pasuruan, yang terdiri dari sekolah negeri (dibawah naungan Dinas Pendidikan) dan sekolah swasta (khususnya madrasah dibawah Kementerian Agama). Responden tersebar di berbagai kecamatan, dengan representasi yang cukup merata dari wilayah perkotaan hingga pedesaan. Mayoritas responden berpendidikan terakhir S1 (Strata-1), dengan sebagian kecil berpendidikan S2 (Strata-2), menunjukkan bahwa kapasitas kepemimpinan pendidikan di wilayah ini telah memenuhi standar kualifikasi akademik minimal. Jenis kelamin responden bervariasi dengan representasi yang cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan, mencerminkan partisipasi gender dalam kepemimpinan pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

5.1.1 Kecukupan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Strategi Pembiayaan Tambahan

Sebanyak 58,11% responden menyatakan bahwa dana BOS sudah mencukupi kebutuhan operasional sekolah. Namun, terdapat 40,54% responden (24 responden menyatakan kurang dan 6 responden menyatakan sangat kurang) yang mengindikasikan bahwa dana tersebut belum sepenuhnya memadai. Hanya 1,35% responden (1 orang) yang menyatakan dana BOS sangat mencukupi. Data ini mengungkapkan bahwa meskipun mayoritas sekolah merasa terbantu dengan dana BOS, masih terdapat kelompok signifikan yang mengalami kekurangan pembiayaan operasional.

Dari analisis lebih mendalam, ditemukan bahwa persepsi kecukupan dana BOS berkorelasi dengan status lembaga pendidikan. Sekolah negeri cenderung lebih banyak menyatakan cukup dibandingkan dengan madrasah/swasta. Hal ini mengindikasikan adanya disparitas dalam pengelolaan dan alokasi dana BOS antara

kedua jenis lembaga pendidikan tersebut. Beberapa responden dari madrasah menyatakan bahwa besaran dana BOS yang diterima tidak sebanding dengan kebutuhan operasional yang semakin kompleks, terutama terkait dengan pengembangan sarana prasarana dan peningkatan kualitas pembelajaran. Untuk mengatasi keterbatasan dana BOS, berbagai strategi pembiayaan tambahan telah dikembangkan oleh lembaga pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Strategi yang paling dominan adalah iuran komite sekolah (disebutkan oleh 34 responden), diikuti oleh kerjasama dengan dunia usaha (14 responden), dan infaq/sumbangan sukarela (7 responden). Beberapa sekolah juga memanfaatkan bantuan pemda/pusat (10 responden) dan paguyuban orang tua siswa (4 responden) sebagai sumber pembiayaan alternatif.

Strategi pembiayaan ini menunjukkan kemampuan adaptif lembaga pendidikan di Kabupaten Pasuruan dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Namun, strategi tersebut juga menimbulkan beban finansial tambahan bagi orang tua siswa, khususnya di daerah dengan kondisi ekonomi yang masih berkembang. Beberapa responden mengungkapkan kekhawatiran akan meningkatnya beban ekonomi keluarga akibat berbagai iuran tambahan tersebut, yang berpotensi mempengaruhi aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

5.1.2 Kondisi Fasilitas Fisik Lembaga Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara, kondisi fasilitas fisik lembaga pendidikan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan variasi yang signifikan antar wilayah dan jenis lembaga. Sebanyak 65% responden menyatakan bahwa fasilitas sekolah mereka masih belum memenuhi standar yang diharapkan, dengan berbagai keterbatasan yang spesifik sesuai dengan konteks masing-masing lembaga.

Fasilitas yang paling sering disebutkan sebagai belum memadai adalah:

1. Laboratorium (IPA, bahasa, dan komputer) - disebutkan oleh 45 responden
2. Perpustakaan - 38 responden
3. Sanitasi dan kamar mandi siswa - 32 responden
4. Lapangan olahraga - 29 responden
5. Ruang kelas - 25 responden

Kondisi fasilitas ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Pasuruan telah berupaya meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan, masih terdapat kesenjangan yang perlu diperhatikan. Beberapa responden mengungkapkan bahwa fasilitas yang ada saat ini hanya memenuhi kebutuhan minimal, sehingga kurang mendukung pengembangan pembelajaran yang inovatif dan berkualitas.

Prioritas perbaikan fasilitas yang paling banyak diusulkan oleh responden adalah:

1. Pengembangan laboratorium (khususnya IPA dan TIK) - 41 responden
2. Perpustakaan yang representatif - 37 responden
3. Peningkatan kualitas sanitasi - 35 responden
4. Digitalisasi pembelajaran (proyektor, laptop, akses internet) - 32 responden
5. Ruang kelas baru - 28 responden

Prioritas ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis sains dan teknologi, sekaligus memperhatikan aspek kesehatan dan kenyamanan lingkungan belajar. Beberapa responden dari daerah terpencil mengungkapkan bahwa keterbatasan akses internet dan listrik yang stabil menjadi kendala utama dalam mengimplementasikan pembelajaran digital.

5.1.3 Program dan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Lembaga pendidikan di Kabupaten Pasuruan telah mengembangkan berbagai program dan strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan analisis data, program yang paling banyak diimplementasikan adalah:

1. Pelatihan peningkatan kompetensi guru (disebutkan oleh 47 responden)
2. Inovasi metode pembelajaran (40 responden)
3. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran (38 responden)
4. Kerjasama dengan dunia usaha/komunitas (22 responden)
5. Program literasi dan numerasi (18 responden)

Program-program ini menunjukkan kesadaran yang tinggi di kalangan kepala sekolah akan pentingnya pengembangan kapasitas guru dan inovasi pembelajaran sebagai kunci peningkatan mutu pendidikan. Implementasi program literasi dan numerasi yang cukup banyak disebutkan juga mengindikasikan respons terhadap kebutuhan dasar pembelajaran yang menjadi fokus kebijakan pendidikan nasional.

Indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur peningkatan mutu bervariasi antar lembaga, namun dapat dikelompokkan menjadi:

1. Indikator akademik: prestasi dalam lomba/olimpiade, nilai Raport Pendidikan, pencapaian tujuan pembelajaran (disebutkan oleh 42 responden)
2. Indikator non-akademik: perkembangan karakter siswa, kedisiplinan, partisipasi dalam kegiatan sekolah (28 responden)
3. Indikator proses: peningkatan kualitas pembelajaran, partisipasi guru dalam pengembangan profesional (23 responden)

Variasi indikator ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan di Kabupaten Pasuruan telah mengembangkan sistem evaluasi yang komprehensif, meskipun masih diperlukan penguatan dalam hal standarisasi dan validitas pengukuran. Beberapa responden mengungkapkan bahwa pengukuran mutu pendidikan masih cenderung berfokus pada aspek kognitif, sementara aspek afektif dan psikomotorik belum terukur secara optimal.

5.1.4 Siswa Berisiko Putus Sekolah: Faktor dan Strategi Penanganan

Studi ini mengidentifikasi bahwa meskipun kasus putus sekolah di Kabupaten Pasuruan relatif rendah (hanya 15% responden yang melaporkan adanya siswa putus sekolah), namun terdapat kelompok siswa yang berisiko putus sekolah dengan berbagai faktor penyebab. Faktor-faktor dominan yang diidentifikasi adalah:

1. Ekonomi keluarga (disebutkan oleh 18 responden)
2. Minat belajar rendah (13 responden)
3. Jarak sekolah jauh (8 responden)
4. Tekanan untuk bekerja (6 responden)
5. Pernikahan dini (3 responden)

Faktor ekonomi keluarga menjadi penyebab utama yang mengancam keberlangsungan pendidikan siswa, terutama di daerah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Beberapa responden melaporkan bahwa orang tua lebih memprioritaskan anak untuk membantu pekerjaan keluarga daripada melanjutkan pendidikan. Fenomena ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang

komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Strategi penanganan yang telah dikembangkan oleh lembaga pendidikan meliputi:

1. Pendekatan personal dan home visit (22 responden)
2. Pemberian beasiswa/bantuan biaya (18 responden)
3. Kerjasama dengan orang tua (15 responden)
4. Motivasi dan bimbingan khusus (12 responden)
5. Pembebasan biaya pendidikan (8 responden)

Strategi-strategi ini menunjukkan komitmen lembaga pendidikan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan setiap siswa. Namun, beberapa responden mengungkapkan bahwa strategi ini masih bersifat parsial dan reaktif, sehingga diperlukan pengembangan sistem pencegahan yang lebih terstruktur dan proaktif.

5.1.5 Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah

Berdasarkan persepsi responden, kebijakan pemerintah daerah yang dinilai paling mendukung peningkatan mutu pendidikan adalah:

1. Penyediaan dana BOS/BOSDA (38 responden)
2. Program PIP (Program Indonesia Pintar) (25 responden)
3. Pelatihan guru dan kepala sekolah (22 responden)
4. Bantuan sarana prasarana (18 responden)
5. Pengembangan kurikulum lokal (12 responden)

Kebijakan-kebijakan ini dinilai telah memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Namun, responden juga mengidentifikasi beberapa aspek yang perlu diperbaiki atau ditambahkan dalam kebijakan pemerintah daerah, yaitu:

1. Ketidakmerataan perhatian antara sekolah negeri dan swasta/madrasah (disebutkan oleh 27 responden)
2. Keterlambatan penyaluran dana bantuan (18 responden)
3. Administrasi yang rumit dalam pengajuan bantuan (15 responden)
4. Kurangnya koordinasi antar dinas terkait (12 responden)
5. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan pendidikan (10 responden)

Temuan ini mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berupaya mendukung pengembangan pendidikan, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan, khususnya terkait dengan efisiensi, efektivitas, dan pemerataan. Isu ketidakadilan perhatian antara sekolah negeri dan madrasah/swasta muncul sebagai tema dominan dalam diskursus kebijakan pendidikan di Kabupaten Pasuruan

5.1.6 Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Berdasarkan Perspektif Institusi Sekolah

Wawancara mendalam dengan Kepala Sekolah memberikan perspektif manajerial dan institusional yang memperdalam serta mengontekstualisasikan temuan dari angket masyarakat. Analisis tematik menghasilkan empat tema utama.

1: Konstruksi Ketidacukupan Pembiayaan dan Infrastruktur

Dari perspektif sekolah, faktor ekonomi dimanifestasikan dalam bentuk keterbatasan anggaran operasional dan pembangunan. Dana BOS: Meskipun 58,1% KS menilai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) cukup, penilaian ini lebih kepada kecukupan untuk membayar kebutuhan listrik, air, dan honor minimal, bukan untuk peningkatan mutu. Sebanyak 40,5% KS menyatakan dana BOS kurang hingga sangat kurang, sebuah kondisi yang lebih banyak dilaporkan oleh sekolah swasta. Keterbatasan ini memaksa sekolah untuk menggantungkan pembiayaan tambahan pada iuran komite sekolah (73% responden) dan kerjasama dengan dunia usaha/komunitas (28,4%). Model pembiayaan ini bersifat tidak stabil dan berpotensi menimbulkan beban baru bagi orang tua serta ketimpangan antar sekolah berdasarkan kapasitas mobilisasi sosialnya.

Kondisi Infrastruktur Penunjang Mutu, Hampir semua KS menyoroti defisit infrastruktur kritis: laboratorium (IPA, komputer, bahasa), perpustakaan yang berfungsi, sanitasi yang layak, dan lapangan olahraga. Ketiadaan fasilitas ini secara langsung membatasi ruang gerak penerapan kurikulum, penumbuhan minat belajar, dan pengembangan kompetensi abad ke-21 siswa. Kebutuhan mendesak akan digitalisasi (proyektor, laptop, internet) juga mengemuka, dengan kendala jaringan internet yang buruk di daerah tertentu (misalnya, Lekok) menjadi penghambat nyata transformasi pembelajaran.

2: Identifikasi dan Respons Sekolah terhadap Faktor Risiko Putus Sekolah

KS secara aktif mengidentifikasi siswa berisiko, dan penyebab yang mereka laporkan memperkuat data masyarakat:

- Faktor Ekonomi Keluarga konsisten disebut sebagai pemicu utama. Sekolah merespons dengan strategi mitigasi seperti pemberian beasiswa atau keringanan biaya(sekolah murah, subsidi silang), melakukan kunjungan rumah dan pendekatan persuasif kepada orang tua.
- Rendahnya Minat Belajar yang diidentifikasi 21 KS berkorelasi dengan temuan angket malas dan sudah merasa cukup. KS menghubungkannya dengan kompleksitas penyebab, termasuk kurangnya dukungan belajar di rumah, pengaruh pergaulan, dan metode pembelajaran di kelas yang belum sepenuhnya menarik.
- Pernikahan Usia Dini dan Tekanan Bekerja dikonfirmasi oleh beberapa KS, terutama di wilayah-wilayah spesifik. Hal ini sejalan sempurna dengan temuan dominan pada angket masyarakat, menunjukkan bahwa ini adalah fenomena nyata yang diakui oleh institusi, bukan sekadar persepsi individu.
- Kendala Jarak menjadi isu nyata di wilayah geografis yang sulit. Beberapa sekolah swasta berinisiatif menyediakan asrama atau transportasi, namun solusi ini membutuhkan sumber daya tambahan yang tidak dimiliki semua sekolah.

3: Kesenjangan Kebijakan dan Persepsi Ketidakadilan: Dikotomi Negeri, Swasta dan Lembaga Pendidikan di bawah naungan Kemenag

Tema sistemik yang kuat dan berulang adalah keluhan mengenai kesenjangan perlakuan antara sekolah negeri (di bawah Dinas Pendidikan) dan sekolah/madrasah swasta (terutama di bawah Kemenag). Alokasi Sumber Daya yang Tidak Merata: KS madrasah swasta menyatakan mereka kurang diperhatikan dalam hal bantuan sarana-prasarana fisik, rehabilitasi gedung, dan pemberian insentif bagi guru. Mereka merasa kebijakan pemerintah daerah lebih berpihak kepada sekolah negeri. Problem Pendanaan PIP dan BOSDA: Sejumlah madrasah melaporkan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) yang sangat minim dan proses penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang tidak jelas atau tidak ada bagi mereka.

Implikasi terhadap Kesenjangan Mutu dan Akses: Kesenjangan ini

berpotensi menciptakan masalah baru. Siswa dari keluarga kurang mampu, yang seharusnya mendapat dukungan lebih, justru sering terkonsentrasi di sekolah swasta (karena berbagai faktor seperti zonasi, daya tampung). Jika sekolah swasta tersebut kekurangan sumber daya, maka terjadi penguatan ketimpangan: yang miskin mendapat layanan pendidikan yang lebih terbatas. Ini merupakan faktor penghambat struktural yang krusial dan perlu dimasukkan sebagai variabel dalam analisis kebijakan.

5.2 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Capaian RLS dan HLS dari Perspektif Masyarakat Usia 25-30 Tahun

Data angket oleh masyarakat mengungkap spektrum alasan tidak melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Analisis terhadap sektor pekerjaan mengungkapkan dominasi sektor informal dan pekerjaan dengan produktivitas rendah. Ibu Rumah Tangga (IRT) menjadi kategori terbesar (31,1%), diikuti oleh wiraswasta (11,4%), karyawan swasta (10,2%), dan guru (8,4%). Profil pekerjaan ini mengindikasikan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal serta rendahnya tingkat pendapatan rata-rata rumah tangga di Kabupaten Pasuruan. Analisis menunjukkan bahwa penyebabnya bersifat multifaktor dan saling berkaitan, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga klaster utama:

5.2.1 Faktor Sosial-Budaya dan Norma Gender yang Dominan

Klaster ini merupakan faktor penghambat terkuat. Sebanyak 54,5% responden menyatakan alasan menikah/mengurus rumah tangga sebagai penyebab berhentinya pendidikan. Angka ini secara signifikan didukung oleh profil responden yang didominasi perempuan. Fenomena ini mengindikasikan adanya konstruksi sosial dan norma gender di Kabupaten Pasuruan yang masih mengutamakan peran domestik perempuan, seringkali dipicu oleh praktik pernikahan usia dini. Hal ini mengakibatkan terpotongnya siklus pendidikan perempuan secara paksa, yang tidak hanya berdampak pada RLS individu tetapi juga pada HLS generasi berikutnya, karena tingkat pendidikan ibu memiliki korelasi kuat dengan partisipasi pendidikan anak.

Selain itu, persepsi terhadap nilai pendidikan yang terbatas turut

berkontribusi. Sebanyak 23,9% responden merasa sudah cukup dengan pendidikan yang dimiliki. Persepsi ini dapat berasal dari ketidakmampuan melihat keterkaitan langsung antara jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan peningkatan kualitas hidup dan mobilitas sosial ekonomi di konteks lokal, atau adanya contoh dari lingkungan yang menguatkan narasi tersebut.

5.2.2 Faktor Ekonomi sebagai Determinant Struktural

Klaster faktor ekonomi muncul sebagai penghambat utama kedua. Sebanyak 29,1% responden menyebutkan tidak ada biaya sebagai kendala, diikuti oleh 26,8% yang harus bekerja/membantu keluarga. Temuan ini mengonfirmasi teori modal manusia bahwa investasi pendidikan sangat bergantung pada kapasitas finansial rumah tangga. Tekanan ekonomi memaksa rumah tangga untuk melakukan antara menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar atau memanfaatkan tenaga kerja anak untuk menambah pendapatan. Kondisi ini diperparah oleh struktur pekerjaan responden yang didominasi sektor informal dengan pendapatan yang tidak tetap dan rendah, sehingga mengerdilkan kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam pendidikan jangka panjang.

5.2.3 Faktor Akses, Minat, dan Alternatif

Klaster ini melengkapi gambaran penyebab yang lebih spesifik. Kendala jarak sekolah terlalu jauh/transportasi tidak tersedia (5,6%) merepresentasikan tantangan geografis yang dihadapi masyarakat di daerah terpencil atau perbatasan kecamatan. Sementara itu, faktor tidak mau sekolah/malas (11,3%) dan pengaruh lingkungan/teman (1,4%) mengindikasikan masalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa, yang dapat berkaitan dengan kualitas dan relevansi pembelajaran di sekolah. Adanya pilihan melanjutkan ke pondok pesantren/pendidikan non-formal keagamaan (8%) menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memandang lembaga pendidikan keagamaan sebagai alternatif yang valid dan mungkin lebih terjangkau atau selaras dengan nilai yang dianut, meskipun secara statistik tidak selalu berkontribusi pada peningkatan RLS formal.

5.2.4 Hubungan Pendidikan terakhir masyarakat usia 25-30 tahun dengan alasan tidak melanjutkan studi

Analisis pada bagian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tingkat

pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh masyarakat usia 25–30 tahun berhubungan dengan alasan mereka tidak melanjutkan studi. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi pola-pola keputusan pendidikan yang muncul pada kelompok usia produktif awal, serta untuk melihat sejauh mana faktor sosial, ekonomi, dan transisi menuju dunia kerja memengaruhi keberlanjutan pendidikan mereka. Dengan menelaah hubungan antara kedua variabel tersebut, analisis ini memberikan gambaran lebih jelas mengenai karakteristik hambatan pendidikan di Kabupaten Pasuruan dan implikasinya bagi strategi peningkatan angka partisipasi pendidikan di masa mendatang.

Tabel 9. Tabulasi Silang Hubungan Pendidikan Terakhir dengan Alasan tidak lanjut Sekolah

Pendidikan Terakhir	Menikah	Faktor Ekonomi	Bekerja	Tidak Berminat	Total
SD	4 (23,5%)	11 (64,7%)	0 (0,0%)	2 (11,8%)	17
SMP	21 (72,4%)	6 (20,7%)	2 (6,9%)	0 (0,0%)	29
SMA	41 (41,8%)	17 (17,3%)	30 (30,6%)	10 (10,2%)	98
Total	66 (45,8%)	34 (23,6%)	32 (22,2%)	12 (8,3%)	144

Pola alasan ketidakberlanjutan studi menunjukkan variasi yang jelas antar jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh responden. Pada lulusan SD, alasan tidak melanjutkan pendidikan didominasi oleh faktor ekonomi (64,7 persen), sementara alasan lain seperti menikah atau bekerja hampir tidak muncul. Temuan ini mengindikasikan bahwa hambatan struktural, khususnya keterbatasan biaya pendidikan dan dukungan keluarga, menjadi faktor utama yang menghalangi siswa SD untuk melanjutkan sekolah. Kondisi ini sekaligus menunjukkan besarnya kebutuhan akan intervensi berbasis bantuan sosial maupun dukungan akses pendidikan bagi kelompok usia ini.

Pada lulusan SMP, pola yang tampak berbeda secara mencolok. Sebanyak 72,4 persen responden menyebut pernikahan sebagai alasan utama tidak melanjutkan studi. Dominasi faktor ini menunjukkan masih kuatnya praktik dan tekanan sosial terkait pernikahan dini yang berdampak langsung terhadap

keberlanjutan pendidikan pada kelompok remaja. Sementara itu, peran faktor ekonomi tetap terlihat namun tidak sekuat pada lulusan SD. Temuan ini menegaskan bahwa pada jenjang SMP, isu sosial budaya menjadi faktor kritis yang perlu ditangani melalui pendekatan lintas sektor, termasuk pemberdayaan keluarga, edukasi kesehatan reproduksi, dan penguatan regulasi terkait perlindungan anak.

Sementara itu, lulusan SMA menunjukkan pola yang lebih beragam, ditandai dengan kombinasi alasan menikah (41,8 persen) dan bekerja (30,6 persen). Hal ini menggambarkan bahwa pada kelompok usia dewasa muda, keputusan untuk tidak melanjutkan pendidikan lebih banyak terkait dengan transisi ke dunia kerja maupun pembentukan keluarga. Faktor ekonomi tetap berperan, tetapi orientasi terhadap kemandirian dan kebutuhan enteri ke pasar kerja tampak lebih dominan. Variasi alasan ini menunjukkan bahwa intervensi pada lulusan SMA perlu didesain untuk memperkuat kesiapan karier dan membuka akses pendidikan lanjutan yang lebih fleksibel.

Tabel 10 Hasil Chisquare Hubungan Pendidikan Terakhir Dan Alasan Tidak
Melanjutkan Studi

Uji Statistik	Nilai Chi-Square	df	Sig. (p-value)
Pearson Chi-Square	33,565	6	0,000
Likelihood Ratio	36,474	6	0,000
Fisher's Exact Test	30,803	—	0,000
Linear-by-Linear Association	3,031	1	0,082
N Valid Cases	144	—	—

Hasil uji Chi-Square menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pendidikan terakhir masyarakat usia 25–30 tahun dan alasan mereka tidak melanjutkan studi. Nilai Pearson Chi-Square sebesar 33.565 dengan derajat bebas ($df = 6$) menghasilkan tingkat signifikansi $p = 0.000$, yang berada jauh di bawah batas signifikansi 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi alasan tidak melanjutkan studi tidak terjadi secara acak, melainkan berkaitan erat dengan jenjang pendidikan terakhir yang telah ditempuh responden. Konsistensi hasil ini diperkuat oleh Likelihood Ratio ($\chi^2 = 36.474$; $p = 0.000$), yang memberikan kesimpulan

serupa mengenai adanya asosiasi kuat antar kedua variabel.

Selain itu, Fisher's Exact Test yang sering digunakan ketika terdapat sel dengan frekuensi harapan rendah, juga menunjukkan signifikansi yang tinggi ($p = 0.000$). Keberadaan 4 sel (33,3 persen) dengan expected count di bawah 5 dengan nilai minimum 1.42, memang menuntut kehati-hatian dalam interpretasi, namun hasil Fisher yang juga signifikan memastikan bahwa asosiasi yang ditemukan tetap valid secara statistik. Uji Linear-by-Linear Association menghasilkan $p = 0.082$, menunjukkan bahwa pola hubungan tidak bersifat linier, sehingga perbedaan antar kategori pendidikan lebih mencerminkan variasi kategori daripada tren yang berurutan.

Monte Carlo simulation dengan 10.000 tabel sampel memberikan estimasi signifikansi yang stabil ($p = 0.000$; CI 99 persen = 0.000–0.000), sehingga memperkuat reliabilitas hasil, terutama pada kondisi sel kecil. Dengan jumlah kasus valid sebanyak 144, hasil uji ini memberikan bukti statistik yang kuat bahwa pendidikan terakhir memiliki keterkaitan bermakna dengan alasan masyarakat usia 25–30 tahun tidak melanjutkan studi. Temuan ini menjadi landasan penting untuk memahami dinamika keputusan pendidikan pada kelompok usia produktif awal. Analisis Faktor Penghambat Melanjutkan Pendidikan Prevalensi Diskontinuitas Pendidikan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa 91,0% responden tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah mencapai tingkat pendidikan terakhir mereka. Hanya 9,0% yang masih aktif dalam proses pembelajaran formal maupun non-formal. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan menunjukkan adanya masalah struktural yang serius dalam sistem pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

Faktor Ekonomi sebagai Determinant Utama

Faktor ekonomi muncul sebagai hambatan paling dominan dengan 42,5% responden menetapkan Tidak ada biaya (biaya SPP/kebutuhan sekolah) sebagai alasan prioritas utama. Data ini konsisten dengan karakteristik pekerjaan responden yang didominasi oleh sektor informal dan pekerjaan berpendapatan rendah. Fenomena ini mencerminkan kegagalan sistem perlindungan sosial dan bantuan pendidikan dalam menjangkau kelompok rentan secara efektif.

Dinamika Sosial-Kultural yang Menghambat

Faktor pernikahan dini dan pengelolaan rumah tangga menempati posisi kedua dengan 9,3% responden memilih Menikah/mengurus rumah tangga sebagai alasan utama berhenti sekolah. Analisis gender menunjukkan bahwa 65,8% dari responden yang memilih alasan ini adalah perempuan, mengindikasikan adanya bias gender yang sistemik dalam akses pendidikan lanjutan. Tradisi pernikahan usia muda masih kuat di beberapa kecamatan seperti Pasrepan, Prigen, dan Rejoso, menciptakan siklus reproduksi kemiskinan dan rendahnya pendidikan antar generasi.

Persepsi terhadap Nilai Pendidikan

Sebanyak 12,0% responden merasa Sudah cukup dengan pendidikan yang dimiliki, menunjukkan adanya persepsi bahwa pendidikan formal tidak lagi memberikan nilai tambah yang signifikan setelah mencapai tingkat tertentu. Persepsi ini lebih kuat di kalangan lulusan SMA/SMK yang telah mendapatkan pekerjaan, meskipun pekerjaan tersebut berada di sektor informal dengan

Kendala Akses dan Infrastruktur

Meskipun persentasenya lebih kecil (4,8%), faktor Jarak sekolah terlalu jauh/transportasi tidak tersedia menjadi hambatan kritis di kecamatan dengan kondisi geografis terpencil seperti Sukorejo, Pasrepan, dan Gondang Wetan. Ketidakmerataan distribusi institusi pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi di Kabupaten Pasuruan memperparah ketimpangan akses pendidikan antar wilayah.

Analisis Perbedaan Antar Wilayah

Variasi Pola Hambatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah. Penelitian menemukan variasi signifikan dalam pola hambatan melanjutkan pendidikan di berbagai kecamatan di Kabupaten Pasuruan:

- Kecamatan Urban (Bangil, Pandaan): Faktor ekonomi menjadi dominan (45-50% responden), diikuti oleh kebutuhan bekerja. Akses relatif lebih baik namun tekanan ekonomi rumah tangga lebih tinggi.
- Kecamatan Pertanian (Pasrepan, Nguling): Kombinasi faktor ekonomi (40-45%) dan pernikahan dini (30-35%) dengan pengaruh kuat tradisi lokal.
- Kecamatan Pegunungan (Puspo, Tosari): Faktor geografis (jarak, transportasi) muncul lebih signifikan (15-20%) bersamaan dengan faktor ekonomi.

- Kecamatan dengan Tradisi Keagamaan Kuat (Prigen, Wonorejo): Pilihan pendidikan non-formal keagamaan (pesantren) menjadi alternatif signifikan (10-15%) terutama bagi perempuan.

Ketimpangan Antar Kecamatan

Analisis spasial menunjukkan bahwa kecamatan dengan RLS terendah cenderung memiliki pola hambatan yang lebih kompleks dan multidimensional. Di Pasrepan misalnya, responden menghadapi kombinasi faktor ekonomi, sosial-kultural, dan geografis secara simultan, menciptakan lingkungan yang sangat tidak mendukung untuk melanjutkan pendidikan.

5.2.5 Implikasi terhadap Indikator Pembangunan Pendidikan

Dampak terhadap Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Tingginya prevalensi diskontinuitas pendidikan di kalangan usia produktif 25-30 tahun secara langsung menekan nilai RLS Kabupaten Pasuruan. Dengan mayoritas responden berhenti pada jenjang SMA/SMK dan hanya sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi, rata-rata akumulasi tahun sekolah menjadi stagnan pada level 7,3-7,4 tahun. Faktor ekonomi yang menjadi hambatan utama menunjukkan bahwa peningkatan RLS tidak dapat dicapai hanya melalui intervensi pendidikan semata, tetapi memerlukan pendekatan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Proyeksi terhadap Harapan Lama Sekolah (HLS)

Rendahnya HLS (12,78 tahun) mencerminkan keterbatasan peluang dan akses pendidikan bagi generasi muda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola putus sekolah cenderung diwariskan antargenerasi. Orang tua dengan pendidikan rendah dan pekerjaan tidak tetap cenderung tidak memiliki kapasitas ekonomi maupun motivasi untuk mendorong anak-anak mereka mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, tanpa intervensi yang sistematis, nilai HLS Kabupaten Pasuruan diprediksi akan tetap tertinggal dari rata-rata provinsi.

5.3 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Capaian RLS dan HLS dari Perspektif

Siswa

Berdasarkan data survei yang terkumpul dari 695 responden siswa yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan di wilayah Kabupaten Pasuruan, dapat diidentifikasi bahwa partisipasi tertinggi berasal dari siswa Sekolah Dasar (SD) dengan persentase sekitar 40%, diikuti oleh siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sekitar 30%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekitar 25%, dan Perguruan Tinggi sekitar 5%. Sebaran geografis responden mencakup beberapa kecamatan seperti Bangil, Gondangwetan, Kejayan, Prigen, Sukorejo, Rejoso, Pasrepan, dan Winongan, yang merepresentasikan keragaman sosio-geografis di kabupaten ini. Mayoritas responden bersekolah di institusi negeri, menunjukkan keterlibatan publik yang kuat dalam sistem pendidikan formal di daerah ini.

5.3.1 Distribusi Usia dan Jenjang Pendidikan

Rentang usia responden berkisar antara 9 hingga 30 tahun, dengan konsentrasi tertinggi pada kelompok usia 11–18 tahun yang sesuai dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Temuan ini sejalan dengan struktur demografi Kabupaten Pasuruan yang didominasi oleh populasi usia sekolah. Namun, terdapat anomali data pada kolom usia, seperti input Saiful, 402.0, atau 17-10-2009, yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme validasi data survei. Hal ini merefleksikan perlunya penguatan sistem pengumpulan data berbasis digital dengan validasi otomatis untuk menjamin akurasi informasi.

5.3.2 Aksesibilitas dan Mobilitas Siswa

Sebagian besar responden menyatakan jarak tempuh ke sekolah relatif dekat, yaitu dalam kisaran ≤ 15 menit. Moda transportasi yang dominan digunakan adalah jalan kaki (35%), sepeda (30%), dan sepeda motor (25%). Data ini mengisyaratkan bahwa sebagian besar siswa berasal dari keluarga dengan akses transportasi terbatas dan tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Kondisi ini dapat berdampak positif pada tingkat kehadiran dan partisipasi siswa, namun juga mencerminkan keterbatasan mobilitas untuk mengakses pusat-pusat belajar atau fasilitas pendidikan tambahan di luar wilayah tempat tinggal.

5.3.3 Dukungan Ekonomi melalui Beasiswa

Sekitar 20–25% responden mengonfirmasi penerimaan bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), atau bentuk bantuan lainnya. Meskipun angka ini menunjukkan adanya upaya pemerataan akses pendidikan, mayoritas siswa belum terjangkau oleh program bantuan tersebut. Hal ini mengisyaratkan potensi kesenjangan informasi atau mekanisme penyaluran yang belum optimal, terutama di daerah pedesaan atau wilayah terpencil di Kabupaten Pasuruan.

5.3.4 Peran dan Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan

5.3.4.1 Pemantauan Aktivitas Belajar di Rumah

Sebanyak 50% responden menyatakan bahwa orang tua sering atau selalu memantau pengerjaan tugas rumah, sementara 25% menyatakan kadang-kadang, dan 25% lainnya menyatakan jarang atau tidak pernah. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar orang tua terlibat aktif, masih terdapat segmen yang kurang memberikan pendampingan akademik kepada anak. Faktor penyebabnya dapat beragam, antara lain kesibukan kerja, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya **pendampingan belajar**.

5.3.4.2 Partisipasi dalam Forum Komunikasi Sekolah

Sebanyak 85% responden menyebutkan bahwa orang tua hadir dalam rapat sekolah, sementara 15% menyatakan ketidakhadiran atau ketidaktahuan. Tingginya angka kehadiran ini mencerminkan budaya partisipasi orang tua yang positif di Kabupaten Pasuruan, sekaligus menunjukkan fungsi sekolah sebagai institusi yang mampu menjalin komunikasi dengan komunitas orang tua. Namun, tetap diperlukan upaya untuk menjangkau 15% keluarga yang belum terlibat, agar tidak terjadi kesenjangan informasi dan dukungan.

5.3.4.3 Tingkat Keterlibatan dalam Diskusi Kelas

Pada skala penilaian 1–5, rata-rata skor untuk pernyataan Guru sering melibatkan siswa dalam diskusi di kelas adalah 3.8. Mayoritas responden memberikan nilai 3 hingga 5, menunjukkan persepsi positif terhadap interaksi

pembelajaran partisipatif. Namun, variasi nilai tersebut juga mengisyaratkan adanya perbedaan gaya mengajar di antara guru, serta kemungkinan pengaruh Rata-rata skor penggunaan media pembelajaran oleh guru (buku, papan tulis, ICT) adalah 4.0. Hasil ini mencerminkan bahwa guru di Kabupaten Pasuruan telah memanfaatkan berbagai media dalam proses belajar-mengajar, meskipun pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) masih perlu ditingkatkan, terutama di sekolah-sekolah dengan akses infrastruktur digital yang terbatas.

Skor kepuasan siswa rata-rata mencapai 4.0, dengan distribusi mayoritas pada skor 4 dan 5. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum, siswa merasa puas dengan pengalaman belajar mereka. Namun, terdapat pula responden yang memberikan skor rendah (1–3), yang perlu ditindaklanjuti dengan identifikasi faktor penyebab, seperti metode mengajar yang monoton, kurangnya variasi media, atau lingkungan belajar yang kurang mendukung.

Aspirasi Pendidikan dan Cita-Cita Akademis. Sebanyak 40% siswa bercita-cita mencapai jenjang pendidikan SMA/SMK, 25% menargetkan gelar Sarjana (S1), 20% berkeinginan melanjutkan hingga Magister atau Doktor (S2/S3), dan 15% lainnya menargetkan jenjang Diploma atau tetap pada tingkat SMP. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki aspirasi pendidikan yang tinggi, dengan keinginan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Hal ini mencerminkan motivasi intrinsik yang kuat serta kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai modal mobilitas sosial. Skor penggunaan media pembelajaran yang cukup tinggi perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pemanfaatan TIK, terutama di sekolah-sekolah dengan akses terbatas. Rekomendasi: Pemerintah daerah dapat memperkuat program Sekolah Digital dengan menyediakan akses internet, perangkat TIK, dan pelatihan guru berbasis teknologi.

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekosistem pendidikan di Kabupaten Pasuruan telah menunjukkan dinamika yang positif, dengan tingkat kepuasan siswa yang tinggi, partisipasi orang tua yang kuat, dan aspirasi pendidikan yang menjanjikan. Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan klasik berupa kesenjangan akses terhadap teknologi, keterbatasan mekanisme pendataan, serta variasi kualitas pendampingan belajar dalam keluarga.

Pendekatan kebijakan ke depan seyogianya bersifat holistik dan integratif, melibatkan tidak hanya sekolah dan dinas pendidikan, tetapi juga pemerintah desa, komunitas orang tua, serta sektor swasta dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, pendidikan di Kabupaten Pasuruan dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen mobilitas sosial dan penguatan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

5.4 Hubungan Program Pencegahan Putus Sekolah dengan Faktor Putus Sekolah berdasarkan laporan Guru

Analisis hubungan antara keberadaan program pencegahan putus sekolah pada satuan pendidikan dan faktor-faktor dominan penyebab anak putus sekolah dilakukan melalui uji Chi-Square terhadap data kategorik yang dihimpun dari 120 guru di Kabupaten Pasuruan. Penggunaan uji Chi-Square dipilih untuk mengidentifikasi ada tidaknya asosiasi signifikan antara variabel intervensi (keberadaan program pencegahan) dan variabel outcome (jenis faktor penyebab putus sekolah yang paling sering dilaporkan). Pendekatan ini memberikan dasar empiris untuk menilai apakah penempatan program pencegahan selama ini telah selaras dengan karakteristik permasalahan yang muncul di lapangan. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya menguji hubungan statistik, tetapi juga memberikan gambaran mengenai efektivitas arah kebijakan penanganan putus sekolah serta kesesuaian intervensi yang telah diterapkan dengan kebutuhan nyata di masing-masing wilayah.

Tabel 11. Tabel Silang Hubungan Program Pencegan Putus Sekolah dan Faktor Penyebab

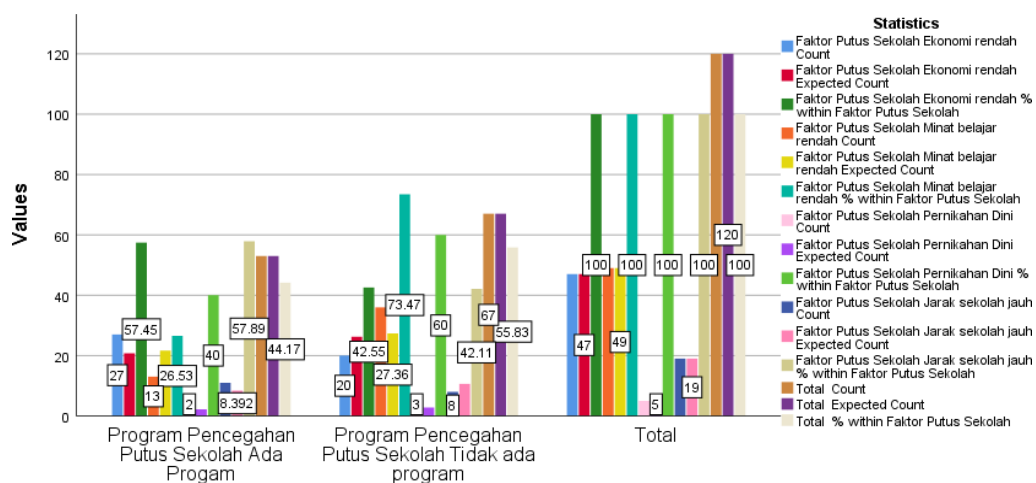
Faktor Putus Sekolah	Ada Program	Tidak Ada Program	Total
Ekonomi rendah	27	20	47
Minat belajar rendah	13	36	49
Pernikahan dini	2	3	5
Jarak sekolah jauh	11	8	19
Total	53	67	120

Tabel 11 menyajikan distribusi frekuensi antara keberadaan program pencegahan putus sekolah dan faktor dominan penyebab putus sekolah yang dilaporkan oleh guru. Tabel ini terdiri dari empat kategori faktor: ekonomi rendah, minat belajar rendah, pernikahan dini, dan jarak sekolah jauh, yang dikaitkan

dengan dua kondisi sekolah: memiliki program pencegahan dan tidak memiliki program.

Distribusi data tersebut memperlihatkan adanya pola yang berbeda dalam pelaporan faktor penyebab putus sekolah antara satuan pendidikan yang telah memiliki program pencegahan dan yang belum memperoleh intervensi serupa. Pada sekolah yang sudah menjalankan program, faktor ekonomi (57,4%) dan jarak sekolah (57,9%) muncul sebagai penyebab yang paling sering dilaporkan oleh guru. Sebaliknya, di sekolah tanpa program, faktor minat belajar rendah menjadi penyebab yang paling dominan, dilaporkan oleh 73,5 persen guru. Perbedaan profil faktor ini mengisyaratkan adanya karakteristik risiko yang tidak seragam antar wilayah dan kemungkinan terkait dengan keberadaan program di sekolah tersebut.

Selain itu, perbandingan antara frekuensi observasi aktual (Count) dan frekuensi harapan (Expected Count) memberikan informasi penting untuk memahami dinamika hubungan antar variabel. Pada kategori ekonomi rendah, jumlah kasus pada sekolah berprogram (27) tercatat lebih tinggi dari nilai yang diharapkan (20,8), sementara pada kategori minat belajar rendah, jumlah observasi pada sekolah tanpa program (36) juga jauh melebihi ekspektasinya (27,4). Ketidakesesuaian antara nilai observasi dan nilai harapan ini menunjukkan adanya pola hubungan yang tidak terjadi secara kebetulan, melainkan mencerminkan kecenderungan tertentu dalam distribusi faktor penyebab putus sekolah. Adapun nilai-nilai expected ditunjukkan pada Gambar 3 Selanjutnya statistik uji lengkap disajikan di Lampiran.



Gambar 3 Visualisasi Faktor Putus Sekolah Berdasarkan Implementasi Program Pencegahan

5.4.1 Pola laporan guru terhadap faktor penyebab putus sekolah antara satuan pendidikan yang telah memiliki dan tidak memiliki program pencegahan

Untuk mengetahui apakah perbedaan pola pelaporan faktor penyebab putus sekolah antara sekolah yang memiliki program pencegahan dan yang belum menjalankannya terjadi secara sistematis, dilakukan analisis menggunakan uji Chi-Square. Pengujian ini bertujuan untuk menilai ada tidaknya hubungan yang bermakna antara keberadaan program dan variasi faktor penyebab putus sekolah yang dilaporkan guru. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12 Uji Chi-Square keberadaan program dan variasi faktor penyebab putus sekolah

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.029 ^a	3	.012
Likelihood Ratio	11.318	3	.010
Linear-by-Linear Association	.048	1	.827
N of Valid Cases	120		

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.21.

Uji Chi-Square menghasilkan nilai Pearson Chi-Square sebesar 11.029 dengan derajat bebas (df) = 3 dan nilai signifikansi $p = 0.012$. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keberadaan program pencegahan putus sekolah dan variasi faktor penyebab putus sekolah yang dilaporkan guru. Temuan ini diperkuat oleh nilai *Likelihood Ratio* ($\chi^2 = 11.318$; $p = 0.010$), yang memberikan hasil konsisten terhadap adanya asosiasi. Nilai *Contingency Coefficient* sebesar 0.290 juga mengindikasikan adanya tingkat keterkaitan yang bersifat moderat antara kedua variabel. Dengan jumlah responden valid sebanyak 120 guru, hasil ini memiliki dasar empiris yang cukup kuat untuk ditindaklanjuti dalam analisis lebih lanjut. Meskipun dalam asumsi statistik, terdapat 2 sel (25%) dengan nilai *expected count* kurang dari 5, dengan nilai minimum sebesar 2.21. Kondisi ini masih berada dalam batas toleransi uji *Chi-Square*, sehingga hasil analisis tetap dapat diterima dan layak diinterpretasikan.

Hasil uji Chi-Square menunjukkan bahwa keberadaan program pencegahan putus sekolah berhubungan dengan pola persepsi guru dalam mengidentifikasi faktor utama penyebab putus sekolah. Hubungan ini tidak hanya bersifat statistik, tetapi juga mencerminkan perbedaan orientasi analitis antara sekolah yang memiliki intervensi dan yang tidak. Pada sekolah yang telah menerapkan program pencegahan, baik berupa kegiatan *home visit*, layanan bimbingan konseling, maupun bantuan sosial, guru lebih banyak mengarahkan perhatian pada hambatan struktural yang dihadapi siswa. Fokus yang lebih besar pada faktor ekonomi dan aksesibilitas (jarak sekolah) menunjukkan bahwa intervensi tersebut memungkinkan guru melihat permasalahan putus sekolah dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai konsekuensi dari keterbatasan sosial-ekonomi yang membutuhkan dukungan institusional.

Di sisi lain, sekolah yang belum memiliki program pencegahan lebih cenderung mengaitkan putus sekolah dengan faktor internal, khususnya rendahnya minat belajar. Orientasi ini menandakan bahwa tanpa adanya intervensi yang terstruktur, guru lebih sering memaknai masalah putus sekolah sebagai persoalan individual, sehingga tanggung jawab perubahan dianggap berada pada siswa itu sendiri, bukan pada lingkungan belajar atau kondisi sosial keluarga.

Menurut salah satu penelitian, menunjukkan bahwa kehadiran jalur intervensi alternatif, seperti program kesetaraan dapat memperluas pemahaman aktor pendidikan terkait akar permasalahan putus sekolah. Penelitian lain juga menegaskan bahwa program pendampingan mampu membentuk persepsi guru dan masyarakat untuk melihat putus sekolah sebagai isu struktural yang menuntut pendekatan kolaboratif. Dengan demikian, keberadaan program pencegahan tidak hanya berdampak pada penurunan risiko putus sekolah, tetapi juga berkontribusi pada perubahan cara pandang guru terhadap sumber masalah. Dengan demikian, program pencegahan dapat berfungsi ganda: menurunkan angka putus sekolah sekaligus mengubah paradigma guru dalam mengidentifikasi faktor risiko.

5.4.2 Implikasi Temuan Dari Hasil Laporan Guru Terhadap Hubungan Program Pencegahan Putus Sekolah Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan signifikan antara keberadaan program pencegahan putus sekolah dengan faktor dominan penyebab putus sekolah

yang dilaporkan guru. Temuan ini memiliki beberapa implikasi penting:

1. Perubahan Fokus Analisis Guru

- Sekolah yang memiliki program pencegahan lebih sering mengidentifikasi faktor eksternal seperti ekonomi dan jarak sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi program membuat guru lebih peka terhadap hambatan struktural yang dialami siswa.
- Sebaliknya, sekolah tanpa program cenderung menekankan faktor internal seperti minat belajar rendah. Artinya, tanpa intervensi, guru lebih mudah mengaitkan putus sekolah dengan kelemahan individu siswa.

2. Peran Program Pencegahan sebagai Determinan Persepsi

- Program pencegahan tidak hanya berfungsi sebagai solusi teknis (misalnya beasiswa, home visit, pendampingan BK), tetapi juga membentuk kerangka berpikir guru dalam memahami penyebab putus sekolah.
- Dengan adanya program, guru lebih melihat putus sekolah sebagai masalah sistemik yang dapat diatasi melalui kebijakan dan dukungan sekolah, bukan semata-mata masalah motivasi pribadi siswa.

3. Implikasi Kebijakan Pendidikan Daerah

- Temuan ini menegaskan pentingnya memperluas cakupan program pencegahan di sekolah-sekolah, terutama di wilayah dengan angka putus sekolah tinggi.
- Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa program pencegahan tidak hanya tersedia, tetapi juga konsisten dan terintegrasi dengan strategi peningkatan mutu pendidikan.

Secara keseluruhan, asosiasi yang signifikan antara kedua variabel ini menunjukkan bahwa program pencegahan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk pemahaman institusional mengenai penyebab putus sekolah. Hasil ini memberikan dasar kuat bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan perluasan cakupan program sebagai strategi peningkatan efektivitas kebijakan pendidikan.

Selain itu, adanya hubungan yang signifikan antara keberadaan program

pencegahan dan faktor penyebab putus sekolah yang dilaporkan guru memiliki implikasi langsung terhadap variabel RLS dan HLS. Program pencegahan yang mampu mengurangi risiko putus sekolah akan berkontribusi pada peningkatan Rata-rata Lama Sekolah melalui peningkatan penyelesaian jenjang pendidikan. Selain itu, efektivitas program dalam menangani hambatan struktural juga berpotensi meningkatkan Harapan Lama Sekolah, karena keluarga dan masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih positif terhadap keberlanjutan pendidikan anak. Dengan demikian, program pencegahan tidak hanya berdampak pada level sekolah, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian indikator pembangunan pendidikan daerah.

BAB VI

ANALISIS STRATEGI RENCANA AKSI DAERAH

6.1 Ringkasan Eksekutif

Analisis mendalam terhadap ekosistem pendidikan Kabupaten Pasuruan menyingkap sebuah paradoks pembangunan. Di satu sisi, Kabupaten Pasuruan memiliki potensi ekonomi dan demografi yang besar sebagai penyangga industri Jawa Timur dengan populasi 1,6 juta jiwa. Namun, di sisi lain, capaian indikator makro pendidikan menunjukkan stagnasi yang mengkhawatirkan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang tertahan pada angka 7,3–7,4 tahun mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas hanya mengeyam pendidikan setingkat kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,78 tahun, meskipun memberikan sinyal optimisme akan wajib belajar 12 tahun, masih rentan tergerus oleh tingginya angka putus sekolah pada masa transisi jenjang pendidikan.

Diagnosis masalah menunjukkan bahwa hambatan pendidikan di Kabupaten Pasuruan bersifat multidimensi, melibatkan interaksi kompleks antara defisit institusional, perangkat kemiskinan struktural, dan hambatan sosio-kultural. Secara institusional, ditemukan adanya disparitas tajam dalam pendanaan dan infrastruktur. Meskipun 58,11% Kepala Sekolah menganggap Dana BOS mencukupi, 40,54% lainnya terutama dari sektor swasta dan madrasah mengalami krisis pembiayaan yang memaksa mereka bergantung pada pungutan orang tua, yang pada gilirannya memperlebar ketimpangan akses bagi si miskin. Ketersediaan fasilitas krusial seperti laboratorium dan perpustakaan masih sangat minim, menghambat relevansi pembelajaran dengan kebutuhan kompetensi abad ke-21.

Dari sisi sosial-ekonomi, kemiskinan menjadi determinan utama. Sebanyak 42,5% responden masyarakat menyebutkan faktor ekonomi sebagai alasan utama tidak melanjutkan sekolah, sebuah angka yang merefleksikan tingginya biaya peluang (*opportunity cost*) pendidikan bagi keluarga berpendapatan rendah. Temuan yang lebih spesifik dan mendesak adalah kuatnya bias gender dan norma pernikahan dini. Sebanyak 54,5% perempuan putus sekolah karena alasan menikah atau mengurus rumah tangga, fenomena yang sangat menonjol di kecamatan-

kecamatan berbasis agraris dan pedesaan. Hal ini diperparah oleh persepsi fatalistik yang penting masuk kelas yang dianut oleh sebagian masyarakat, yang gagal melihat korelasi antara pendidikan tinggi dengan mobilitas sosial.

Analisis spasial juga menyoroti ketimpangan kewilayahan (*spatial inequality*). Wilayah pegunungan (Tosari, Puspo) dan pesisir (Lekok, Nguling) menghadapi tantangan aksesibilitas fisik yang jauh lebih berat dibandingkan wilayah urban (Bangil, Pandaan). Ketiadaan transportasi publik yang handal memaksa 35% siswa berjalan kaki, membatasi pilihan sekolah mereka hanya pada radius terdekat, yang seringkali memiliki kualitas terbatas.

Merespons kompleksitas tersebut, dokumen ini merumuskan Rekomendasi Kebijakan Strategis yang berlandaskan pada empat pilar: (1) Afirmasi Keadilan Anggaran, (2) Transformasi Sosio-Kultural, (3) Pemerataan Spasial, dan (4) Peningkatan Mutu dan Relevansi. Kebijakan ini kemudian diturunkan ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) 2026–2028 yang dibagi ke dalam fase Jangka Pendek (Penanganan Krisis dan Stabilisasi), Jangka Menengah (Perbaikan Sistemik), dan Jangka Panjang (Transformasi Budaya dan Keberlanjutan).

Inti dari strategi ini adalah pergeseran paradigma dari pendekatan sama rata sama rasa menjadi pendekatan afirmasi proporsional. Sumber daya daerah harus diprioritaskan untuk mengintervensi kantong-kantong masalah sekolah swasta miskin, siswa perempuan di desa rawan nikah dini, dan wilayah terisolir. Tanpa intervensi radikal ini, Kabupaten Pasuruan berisiko kehilangan bonus demografi dan terjebak dalam *middle-income trap* akibat rendahnya kualitas modal manusia.

6.1 Kerangka Konseptual dan Pendekatan Analisis

Untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat, laporan ini menggunakan pendekatan analisis *mixed-methods* yang mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif. Kerangka konseptual yang digunakan meliputi:

- a. **Human Capital Theory (Teori Modal Manusia):** Memandang biaya pendidikan (langsung maupun tidak langsung) sebagai investasi yang harus menghasilkan *return* berupa peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Analisis difokuskan pada mengapa masyarakat Pasuruan memandang investasi ini kurang menguntungkan dibanding bekerja dini.
- b. **Structural Functionalism & Conflict Theory:** Digunakan untuk membedah ketimpangan akses. Teori ini membantu menjelaskan mengapa

kelompok tertentu (perempuan, warga miskin, penduduk pegunungan) secara sistematis tertinggal dalam akses pendidikan dibanding kelompok lain.

- c. **Spatial Equity Approach (Pendekatan Keadilan Spasial):** Mengingat luasnya wilayah (1.474,02 km²) dan keragaman topografi, analisis difokuskan pada bagaimana lokasi tempat tinggal mempengaruhi nasib pendidikan seorang anak.

6.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dokumen ini disusun dengan tujuan utama untuk merumuskan intervensi kebijakan yang Strategis dan menysasar akar masalah), Realistis dalam artian dapat dilaksanakan dengan kapasitas fiskal daerah, dan Akurat berbasis data mikro. Sasaran spesifiknya meliputi:

1. **Jangka Pendek (2026-2027):** Menahan laju angka putus sekolah (*drop-out rate*) dan meningkatkan partisipasi transisi SMP ke SMA/SMK.
2. **Jangka Panjang (2028 dan seterusnya):** Meningkatkan RLS secara signifikan mendekati rata-rata provinsi dan mewujudkan HLS yang berkualitas, bukan sekadar angka partisipasi semu.

6.3 Peta Tantangan dan Isu Strategis Daerah

Berdasarkan diagnosis di atas, berikut adalah sintesis isu strategis yang harus dijawab dalam RAD:

Tabel 13. Sintesis Isu Strategis

No	Isu Strategis	Deskripsi Masalah	Implikasi Jangka Panjang
1	Kesenjangan Anggaran (<i>Fiscal Gap</i>)	Dana BOS tidak cukup untuk mutu; Sekolah swasta miskin bergantung pada iuran warga miskin.	Kualitas pendidikan tersegmentasi berdasarkan kelas sosial; RLS stagnan.

2	Bias Gender & Budaya	Pernikahan dini merampas hak pendidikan perempuan (54,5% kasus).	HLS perempuan rendah; IPM terhambat; Potensi stunting tinggi.
3	Disparitas Wilayah (Spatial Inequality)	Sekolah di pegunungan (Tosari, Puspo) dan pesisir (Lekok) minim akses dan fasilitas dibanding Urban.	Pembangunan daerah tidak merata; urbanisasi tidak terkendali.
4	Relevansi Kompetensi	Fasilitas Lab dan TIK minim; Lulusan tidak siap kerja industri.	Pengangguran terdidik meningkat; Kepercayaan publik pada sekolah turun.
5	Paradigma Pendidik	Guru tanpa dukungan sistem cenderung menyalahkan siswa (defisit empati).	Penanganan siswa berisiko gagal; Angka DO tetap tinggi.

6.4 Rekomendasi Kebijakan Strategis

Untuk menjawab tantangan di atas, Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu menerapkan bauran kebijakan (*policy mix*) yang bersifat afirmatif dan transformatif.

a. Kebijakan Afirmasi Keadilan Anggaran (*Fiscal Equity Policy*)

Prinsip keadilan tidak berarti sama rata, tetapi memberikan dukungan lebih besar kepada wilayah dan satuan pendidikan yang paling membutuhkan.

- 1) Redesain BOSDA Berbasis Indeks Kesulitan: Mengubah formula alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Tidak lagi *flat* per siswa/guru, tetapi menggunakan pembobotan (*weighting*). Sekolah di wilayah prioritas, sekolah dengan proporsi siswa pada keluarga miskin.
- 2) Dana Hibah Kompetitif untuk Sarana dan prasarana Sekolah/Madrasah Swasta: Mengalokasikan hibah kompetitif berbasis kinerja dan kebutuhan untuk pengadaan laboratorium digital, dan sarpras vokasional (termasuk pertanian untuk SMK). Madrasah dan sekolah swasta berakreditasi namun minim fasilitas menjadi prioritas, sebagai bentuk investasi daerah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi siswa Pasuruan yang bersekolah di lembaga swasta.
- 1) Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu menerapkan Kebijakan Insentif Guru Daerah Prioritas melalui pemberian tunjangan kinerja khusus bagi guru yang bertugas di kecamatan dengan capaian HLS terendah, yaitu Pasrepan, Kejayan, Rembang, Kraton, Wonorejo. Insentif ini diintegrasikan dengan program pendampingan profesional berupa pelatihan diagnostik, coaching, dan supervisi akademik untuk memastikan peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan pendekatan pembelajaran *deep learning* dan pemberian beasiswa S-2 di Kecamatan Prioritas sebagai penguat HLS. Kehadiran guru berkualitas di wilayah prioritas diharapkan mampu memperkuat proses pembelajaran, menekan angka putus sekolah, serta meningkatkan capaian RLS dan HLS secara signifikan di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.

b. Kebijakan Transformasi Sosio-Kultural

Intervensi kebijakan diarahkan untuk mengubah hambatan budaya yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan.

- 1) Regulasi Pencegahan Pernikahan Usia Sekolah: Mendorong penyusunan Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah yang mengatur kewajiban skrining pendidikan sebelum permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dalam mekanisme ini, Dinas Pendidikan dan DPMD memberikan

rekomendasi/konseling sebagai bagian dari syarat administratif. Langkah ini bertujuan memutus mata rantai pernikahan dini yang menurunkan HLS

- 2) Menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) atau Perda yang mewajibkan mekanisme skrining pendidikan sebelum pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dinas Pendidikan/ DPMD harus memberikan rekomendasi/konseling sebagai syarat administratif.
- 3) Sosialisasi wajib belajar 13 tahun: Mengubah narasi penyuluhan. Tidak hanya jargon Wajib Belajar, tetapi memberikan kalkulasi ekonomi nyata: Lulusan SMA berpenghasilan > 3 juta, Lulusan SD berpenghasilan 2 Juta, S1 4-5 Juta. Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Toga/Tomas) sebagai agen perubahan (*influencer*).
- 4) Pendidikan Fleksibel untuk Perempuan: Mengembangkan model PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan Kejar Paket C yang ramah perempuan (waktu fleksibel, boleh membawa anak, lokasi dekat rumah) untuk menarik kembali mereka yang putus sekolah karena menikah.

c. Kebijakan Pemerataan Spasial dan Akses

Menghilangkan hambatan fisik yang dialami 35% siswa pejalan kaki.¹

- 1) Revitalisasi Transportasi Sekolah: Mengingat banyak siswa berjalan kaki atau bersepeda, Pemkab harus menyediakan armada bus sekolah gratis atau mensubsidi angkutan desa (angdes) khusus untuk rute-rute zona buta transportasi.
- 2) Sekolah Satu Atap (SATAP) Plus: Memperkuat model SMP-SMA terintegrasi di wilayah pegunungan (Tosari, Puspo) untuk meminimalisir jarak transisi antar jenjang.
- 3) Digitalisasi Wilayah Blank Spot: Kerjasama dengan penyedia layanan internet untuk memprioritaskan koneksi fiber optik ke sekolah-sekolah di wilayah pesisir dan pegunungan.

d. Kebijakan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Guru

- 1) Pelatihan Guru Berbasis Diagnostik: Mengubah materi pelatihan guru.

Berdasarkan temuan *Chi-Square*, guru perlu dilatih kemampuan psikologi pendidikan, deteksi dini siswa berisiko (*early warning system*), dan konseling dasar, bukan hanya administrasi mengajar.

- 2) Kemitraan Industri: Mewajibkan setiap SMK memiliki mitra industri (Link and Match) yang konkret, memanfaatkan keberadaan kawasan industri di Pasuruan.

6.5 Rencana Aksi Daerah (Rad) 2026–2028

Rencana Aksi ini dirancang bertahap untuk memastikan keberhasilan implementasi mulai dari penanganan darurat hingga perubahan sistemik.

6.5.1 FASE 1: Jangka Pendek (Tahun 2026) - Emergency Response & Stabilization

Fokus: Menghentikan pendarahan (drop-out), validasi data, dan intervensi krisis.

Tabel 14 Program Emergency Response & Stabilization

Program Prioritas	Kegiatan Kunci	Indikator Kinerja (KPI)	Leading Sector
Satu Data Pendidikan Pasuruan (SDP)	1. Sinkronisasi data Dapodik, Emis (Kemenag), dan DTKS (Dinsos). 2. Sensus cepat Anak Tidak Sekolah (ATS) oleh Pemerintah Desa. 3. Penambahan PKBM Pesantren	Terbentuknya database tunggal ATS <i>by name by address</i> .	Bappelitbangda, Dindik, Kemenag
Gerakan Kembali Menjemput Kesuksesan	1. Home Visit masif oleh guru ke rumah siswa berisiko DO. 2. Pemberian beasiswa untuk siswa kelas akhir SMP/SMA desil 1-4 3. Desain Pembelajaran Online untuk	1.000 ATS kembali ke sekolah/PKBM/ Perguruan Tinggi	Dindik, Pemerintah Desa

	PKBM dan pendidikan tinggi dan RPL (pengakuan kompetensi dalam SKS)		
Optimalisasi Anggaran Mutu	1. Audit penggunaan BOSDA. 2. Revisi Juknis BOSDA untuk tahun anggaran 2027(fokus afirmasi).	Tersusunnya regulasi BOSDA/ KIP-K Afirmatif hingga memastikan siswa kurang mampu dapat melanjutkan perguruan tinggi.	Dindik, BAPPE LITBA NGDA
Kampanye Anti-Nikah Dini	1. Sosialisasi intensif di 5 Kecamatan Zona Merah (Pasrepan, lumbang, puspo, tosari, tutur). 2. MoU dengan Pengadilan Agama dan KUA. 3. kerjasama dengan perguruan tinggi sebagai desa binaan pencegahan pernikahan dini	Penurunan pengajuan dispensasi nikah 10%.	DPMD, Kemenag

6.5.2 FASE 2: Jangka Menengah (Tahun 2027) - Systemic Improvement & Expansion

Fokus: Perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas guru, dan ekspansi akses.

Tabel 15. Program Systemic Improvement & Expansion

Program Prioritas	Kegiatan Kunci	Indikator Kinerja (KPI)	Leading Sector
Revitalisasi Sarana Belajar	1. Pembangunan 20 Lab Komputer & IPA di sekolah swasta/negeri prioritas. 2. Perbaikan sanitasi di 100 sekolah.	100% Sekolah target memiliki Lab berfungsi.	Dinas Perkim, Dindik

Transportasi Pelajar Merata	Subsidi angkutan sekolah desa untuk pelajar.	Absensi siswa karena kendala transportasi <1%.	Dishub
Transformasi Guru	1. Diklat penanganan siswa berisiko bagi 1.000 guru. 2. Penerapan insentif guru daerah terpencil.	Peningkatan skor kompetensi pedagogik guru.	Dindik, BKPSDM
Vokasi Masuk Desa	1. Pelayanan program sertifikasi kompetensi di PKBM/Pesantren 2. Kerjasama magang dengan UMKM lokal.	500 lulusan sertifikasi kompetensi terapan kerja/wirausaha.	Disnaker, Dindik

6.5.3 FASE 3: Jangka Panjang (Tahun 2028) - Cultural Shift & Sustainability

Fokus: Pelembagaan perubahan budaya dan kemandirian sistem.

Tabel 16. Program Cultural Shift & Sustainability

Program Prioritas	Kegiatan Kunci	Indikator Kinerja (KPI)	Leading Sector
Ekosistem Pendidikan Digital	1. Integrasi LMS Daerah di seluruh sekolah. 2. Seluruh sekolah terkoneksi internet kecepatan tinggi.	Peningkatan Literasi Digital siswa (Asesmen Nasional). Sertifikasi pembelajaran digital.	Diskominfo Dindik
Budaya Belajar Masyarakat	1. Pelembagaan Jam Belajar Masyarakat di tingkat desa. 2. Forum Orang Tua Peduli Pendidikan di setiap RW.	HLS mencapai 13 tahun; RLS naik menjadi 7,8 tahun.	Pemdes, DPMD

Kemandirian dan keberlanjutan Sekolah	1. Sekolah mampu menjalin kemitraan mandiri dengan CSR dan perguruan tinggi. 2. BLUD SMK beroperasi menghasilkan pendapatan.	20% SMK berstatus BLUD/Mandiri .	Dindik Bagian Perekonomian
---------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------

6.6 Tata Kelola, Pembiayaan, Dan Manajemen Risiko

Implementasi RAD memerlukan kerangka pendukung yang kuat agar tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas.

6.6.1 Struktur Tata Kelola dan Koordinasi

Direkomendasikan pembentukan Gugus Tugas Percepatan IPM Sektor Pendidikan yang dipimpin langsung oleh tim percepatan pembangunan. Gugus tugas ini memiliki fungsi lintas sektoral, memecahkan silo ego sektoral antara Dinas Pendidikan (sekolah negeri) dan Kemenag (madrasah).

Peran Pemerintah Desa: Vital dalam pelacakan ATS dan penegakan norma sosial (pencegahan nikah dini). Dana Desa (APBDes) harus dialokasikan sebagian untuk dukungan pendidikan PAUD dan penanganan ATS sesuai kewenangan desa.

6.6.2 Strategi Rekayasa Pembiayaan (Financial Engineering)

Mengingat keterbatasan APBD, strategi pembiayaan harus kreatif:

1. Mandatory Spending Efektif: Memastikan 20% anggaran pendidikan benar-benar untuk fungsi pendidikan langsung, bukan habis untuk gaji rutin dan operasional kantor.
2. CSR Terarah: Pemerintah daerah memfasilitasi forum CSR perusahaan di kawasan industri PIER dan sekitarnya. Dana CSR diarahkan spesifik untuk beasiswa vokasi dan pembangunan laboratorium SMK untuk menunjang pra kerja dan pra university, menciptakan *link and match* dengan dunia industry dan perguruan tinggi yang saling menguntungkan.
3. Filantropi & Wakaf: Menggandeng Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Baznas untuk program Wakaf Pendidikan guna membantu infrastruktur madrasah swasta.

6.6.3 Manajemen Risiko

Tabel 17. Manajemen Risiko

Risiko Utama	Probabilitas	Dampak	Strategi Mitigasi
Resistensi Tokoh Agama/Adat terhadap isu penundaan pernikahan dini.	Tinggi	Tinggi	Pendekatan persuasif kultural; Libatkan ormas Islam dalam penyusunan materi sosialisasi.
Inefisiensi Anggaran (Kebocoran/Salah Sasaran).	Sedang	Tinggi	Penerapan sistem pembayaran non-tunai (cashless) untuk semua bantuan; Transparansi data penerima berbasis NIK.
Politisasi Bantuan Pendidikan menjelang tahun politik.	Sedang	Sedang	Standarisasi kriteria penerima bantuan dalam Perbup yang kaku dan berbasis data teknokratik (DTKS).
Kegagalan Teknologi (Internet tidak stabil di pegunungan).	Sedang	Sedang	Penyediaan materi pembelajaran offline (e-book yang bisa diunduh) sebagai cadangan (backup).

6.7 . Kesimpulan Rencana Aksi Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan Kab. Pasuruan sesuai Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rata- rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di kabupaten pasuruan

Tabel 18. Kesimpulan Rencana Aksi Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan Kab. Pasuruan

N o	Indik ator	Akar Masalah	Rencana Aksi	Rincian Kegiatan	Satuan	Baseli ne	Target 2026	Sasaran	Penanggun g jawab
1	Rata Lama Sekol ah	Terbatasnya Akses Pendidikan kesetaraan	Pembentukan TIM Akselerasi IPM Kabupaten dan Tingkat Kecamatan	Pembentukan Tim Struktur Kabupaten dan Kecamatan					Bappelitban gda
		17855 ATS dan Dominasi Pendidikan SD Sederajat	Penambahan PKBM berbasis Industri (Perbup tentang P JLH & TJLS)		PKBM	26 PKBM	50 Perusahaan	50 ATS Ring 1	Dinas Pendidikan, DLH, Disnaker
				Penguatan Peraturan Daerah tentang Kebijakan Alokasi P JLH untuk Aspek Sosial Edukatif					
				Pemetaan wilayah dan Pendataan ATS					

				Menyusun kurikulum					
				Penetapan lokasi PKBM baru					
				Pelaksanaan					
			Penambahan PKBM Komunitas Peternakan		PKBM		48 Komunitas	25 ATS	Dinas Pendidikan, Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan
				Pemetaan wilayah dan Pendataan ATS					
				Menyusun kurikulum					
				Penetapan lokasi PKBM baru					
				Pelaksanaan					
			Penambahan PKBM Komunitas Pertanian		PKBM		48 Komunitas	25 ATS	Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian
				Pemetaan wilayah dan					

				Pendataan ATS					
				Menyusun kurikulum					
				Penetapan lokasi PKBM baru					
				Pelaksanaan					
			Penambahan PKBM Basis Kader Kesehatan Desa		PKBM		48 Komunitas	25 ATS	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPMD
				Pemetaan wilayah dan Pendataan ATS					
				Menyusun kurikulum					
				Penetapan lokasi PKBM baru					
				Pelaksanaan					
			Penambahan PKBM Komunitas Perikanan		PKBM		48 PKBM	25 ATS	Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan
				Pemetaan wilayah dan Pendataan ATS					

				Menyusun kurikulum					
				Penetapan lokasi PKBM baru					
				Pelaksanaan					
			Penambahan PKBM berbasis Pesantren		PKBM		50 PKBM/Pesantren	25 ATS di Pesantren	Dinas Pendidikan, Kemenag, Dewan Pesantren
				Pemetaan wilayah dan Pendataan ATS					
				Menyusun kurikulum					
				Penetapan lokasi PKBM baru					
				Pelaksanaan					
		ATS 17855 dan Dominasi SD Sederajat	Pendataan massal Siswa pondok Pesantren	Pendataan Santri tidak Sekolah di Pesantren Basis Desa	Santri ATS		50 Pesantren	ATS di Pesantren	Dinas Pendidikan, Dewan Pesantren, DPMD
				Pendataan Santri tidak Sekolah di Pesantren					

				Basis Pesantren					
		Perlu Optimalisasi Zero Dropout di Sekolah untuk Minimalisir ATS	Optimalisasi Monitoring Zero Dropout Siswa di sekolah	Pendataan Siswa Rentan Sekolah	Siswa			Siswa SMP-SMA se derajat	Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DPMD
				Pendampingan Keluarga anak Rentan Putus Sekolah					
			PKBM Basis Organisasi Masyarakat	Penandatanganan MoU PKBM dengan Ormas	PKBM		20 PKBM	50 ATS/Ormas	Dinas Pendidikan, Ormas
				Pemetaan wilayah dan Pendataan ATS					
				Menyusun kurikulum					
				Penetapan lokasi PKBM baru					
				Pelaksanaan					
	Hara pan Lama	Persentase Pendidikan Tinggi Rendah	Pemberian Beasiswa bagi siswa SMA sederajat	Sosialisasi Beasiswa Berprestasi	Beasiswa		80 Orang	Siswa Berprestasi	Dinas Pendidikan, Cabdin, PT

	Sekolah		berprestasi untuk studi lanjut						
				MoU Beasiswa dengan Perguruan Tinggi	Orang				Bappelitbangda
				Penyaluran Beasiswa berprestasi					
				Pembinaan Berkelanjutan					
		Persentase Pendidikan Tinggi Rendah	Pemberian Beasiswa bagi siswa SMA sederajat tidak mampu untuk studi lanjut	Sosialisasi Beasiswa Tidak Mampu	Beasiswa		80 Orang	Siswa Tidak Mampu	Dinas Pendidikan, Cabdin, Dinas Sosial, PT
				Pendataan siswa tidak mampu berbasis DTSEN, Dapodik					
				MoU Beasiswa dengan Perguruan Tinggi					

				Penyaluran Beasiswa Tidak Mampu					
				Pembinaan Berkelanjutan					
			Pemberian Beasiswa bagi Sarjana untuk Studi S2	Sosialisasi Beasiswa S2 Basis Kecamatan Prioritas	Beasiswa		40 Orang	Sarjana Kecamatan Prioritas	Dinas Pendidikan, PT, Dinas Sosial
				Seleksi Beasiswa					
				Pemberian Beasiswa					
				Monitoring Beasiswa					
			Sinkronisasi Data Siswa	Pemadanan Data	Data Siswa Aktif				Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dukcapil
2	Usia Harapan Hidup								
	Peneruan AKI/ AKB		Pembentukan Satgas AKI-AKB Terpadu	Pembentukan Satgas Kabupaten dan Kecamatan					Bappelitbangda, Dinas Kesehatan

			Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		Orang				Dinas Kesehatan, Puskesmas, Bidan Desa
				Optimalisasi Sosialisasi Pemeriksaan kehamilan	Orang		ANC 100%	10 Ibu Hamil/Desa/Bulan	
				Sosialisasi resiko pernikahan dini				Siswa Pondok pesantren, SLTP, SLTA, Orangtua siswa SD	
				Peningkatan Sarana prasarana alat Kesehatan Modern					
				Peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan					
				Perencanaan Layanan Polindes Baru hasil overlay					
			Pelaksanaan Audit AKI/AKB					33 Puskesmas	Dinas Kesehatan
			Pendataan dan Pemetaan layanan	Optimalisasi					Dinas Kesehatan

			Polindes per Kecamatan						
			Overlay Peta Risiko AKI/AKB dengan Peta Layanan Polindes					33 Puskesmas	Dinas Kesehatan
		Kompetensi Dasar Kader Kesehatan Desa Rendah	Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Desa	Pelatihan kompetensi Dasar bagi seluruh kader desa terdaftar			Kader Desa 100%	Kader Desa 100%	DPMD, Dinas Kesehatan
		kurang optimalnya P4K	Optimalisasi P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) Desa	Penandatangan MoU P4K Lintas Sektor (DPMD-Kades)			24 Kecamatan 100%	27 Kecamatan 100%	Dinas Kesehatan, DPMD
		Stok donor darah		Screening golongan darah pada Ibu Hamil dan 2 orang keluarga			100% ANC dan 2 Orang Keluarga		
		Ibu Hamil Risiko Tinggi		Pendataan Ibu Hamil Risiko Tinggi					
			Kurang Optimalnya Program Donor Darah	Optimalisasi Program Donor Darah					Dinas Kesehatan

				Bantuan Insentif transport kader/petugas pendamping kunjungan rumah risiko tinggi.			100% Insentif tersalurkan	Ibu Hamil Risiko Tinggi	
				Pemberian Insentif Kunjungan ANC-PNC					
				Pendampingan Ibu Hamil					
		Beban Administraif Tinggi	Integrasi Data Kesehatan	Pengembangan Dashboard Kesehatan terintegrasi			100% Dashbord Kesehatan	Data Kesehatan Terintegrasi	Dinas Kesehatan, Kominfo
		Keterbatasan Anggaran Pengadaan Buku KIA	Pengadaan Logistik Esensial (Buku KIA)	Pengembangan Dashboard KIA Online					Dinas Kesehatan, Kominfo
		Kurang Optimalnya Pemenuhan Gizi Pra-Nikah	Intervensi Gizi Siklus Hidup dan Imunisasi	Screening Gizi Remaja Pra-Nikah			100% SMA Sederajat	Siswa SMA Sederajat	Dinas Kesehatan, Cabdin, Dinas Pendidikan, Kemenag
				Edukasi Gizi terpadu di SMA se derajat					

				Edukasi gizi terpadu bagi calon pengantin					Dinas Kesehatan, Kemenag
				Penguatan Validasi PKH dengan Kewajiban Imunisasi				Dinas Sosial, Ibu penerima PKH, Dinkes.	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
		Screening Penyakit Rentan di Desa	Skrining "Sadar Sehat Desa"	Skrining Anemia, TBC, hipertensi			24 Kecamatan		Dinas Kesehatan, DPMD
				Kunjungan Kader dan Bidan Desa pada Keluarga Rentan					Dinas Kesehatan, DPMD
			Harmonisasi Program dengan NGO (Non-Governmental Organization)	Penandatanganan MoU Kesehatan dengan NGO			100 % MoU	5 NGO Kesehatan	Dinas Kesehatan

Daftar Pustaka

- BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR. (n.d.).
- Dai, S. I. S., Canon, S., & Bauty, D. O. (2023). Analisis pengaruh RLS, pengeluaran perkapita, UHH, dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di KBI dan KTI. ... (*Jurnal Ekonomi Dan* <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/950>
- Elfira, D. G., Hanani, S., Syafitri, A., & ... (2024). Teori Karl Marx dan Redistribusi Sumber Daya Pendidikan: Meninjau Manajemen Pendidikan yang Berorientasi Keadilan Sosial. *Jurnal Pendidikan* <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JUPENDIS/article/download/1190/1133/4102>
- indeks-pembangunan-manusia--ipm--kabupaten-pasuruan-tahun-2025*. (n.d.-a).
- Irawan, R. (2020). Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) Melalui Program Sosialisasi Pendidikan. *Jurnal Pasopati*, 2(2).
- Mustofa, N. H., Widodo, J., & Darmayanti, R. (2024). Filsafat Pendidikan: Hakikat Guru. Siswa dan Interaksi Edukatif Ditinjau dari Manajemen Pendidikan Digital. *Penerbit Adab*.
- Rohmah, I. S., & Prakoso, J. A. (2022). Pengaruh IPM, RLS, TPT, dan pengeluaran perkapita terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis* <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/view/294>
- Sholihah, A. (2024). PERANCANGAN PROTOTIPE SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB PADA ORGANISASI PC IPPNU KABUPATEN PASURUAN. *Dimensi: Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Seni Desain Grafis*, (2), 1–11.
- Suadi, S. (2022). Peningkatan Kualitas dan Layanan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan. *Center of Education Journal (CEJou)*, (1), 62–73.

Lampiran

A. Uji Chi-Square laporan guru terhadap hubungan antara program pencegahan putus sekolah dan faktor-faktor yang mempengaruhi

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Faktor Putus Sekolah * Program Pencegahan Putus Sekolah	120	100.0%	0	0.0%	120	100.0%

Faktor Putus Sekolah * Program Pencegahan Putus Sekolah Crosstabulation

		Program Pencegahan Putus Sekolah			
		Ada Program	Tidak ada program	Total	
Faktor Putus Sekolah	Ekonomi rendah	Count	27	20	47
		Expected Count	20.8	26.2	47.0
		% within Faktor Putus Sekolah	57.4%	42.6%	100.0%
		% within Program Pencegahan Putus Sekolah	50.9%	29.9%	39.2%
	Minat belajar rendah	Count	13	36	49
		Expected Count	21.6	27.4	49.0
		% within Faktor Putus Sekolah	26.5%	73.5%	100.0%
		% within Program Pencegahan Putus Sekolah	24.5%	53.7%	40.8%
	Pernikahan Dini	Count	2	3	5
		Expected Count	2.2	2.8	5.0
		% within Faktor Putus Sekolah	40.0%	60.0%	100.0%
		% within Program Pencegahan Putus Sekolah	3.8%	4.5%	4.2%

Jarak sekolah jauh	Count	11	8	19
	Expected Count	8.4	10.6	19.0
	% within Faktor Putus Sekolah	57.9%	42.1%	100.0%
	% within Program Pencegahan Putus Sekolah	20.8%	11.9%	15.8%
Total	Count	53	67	120
	Expected Count	53.0	67.0	120.0
	% within Faktor Putus Sekolah	44.2%	55.8%	100.0%
	% within Program Pencegahan Putus Sekolah	100.0%	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	11.029 ^a	3	.012
Likelihood Ratio	11.318	3	.010
Linear-by-Linear Association	.048	1	.827
N of Valid Cases	120		

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.21.

B. Dokumentasi Pasca Penelitian





C. Dokumentasi Diskusi Internal

